



VOLUME X | NO. 99 / DESEMBER 2015

# MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



ISSN 1907-6320

## KESEMPATAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN

Dalam bayang-bayang volatilitas ekonomi global, APBN 2016 disahkan oleh pemerintah dan anggota dewan. Dengan implementasi regulasi dan perbaikan pola penyerapan anggaran, terbuka kesempatan untuk memenuhi asumsi dan target pembangunan. Apalagi ekonomi dalam negeri diprediksi bakal tumbuh lebih tinggi.



Menteri Keuangan bersama Sekretaris Jenderal melepaskan balon dalam acara peringatan Hari Oeang ke 69 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (31/10).

Fotografer  
M. Ardani

Teks  
Iin Kurniati

# Daftar Isi



5 Dari Lapangan Banteng

6 Eksposur

10 Lintas Peristiwa

**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. **Ketua Pengarah:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum/Penanggung Jawab:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. **Redaktur Unit Eselon I:** Arief Rahman Hakim (DJBC), Pilar Wirotama (BPPK), Hasan Lufthi (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Etti Dyah Widyati (Itjen), M. Hijrah (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Noer Anggraini (DJPU), Dwinanto (DJKN), Joko Triharyanto (BKF). **Redaktur Foto:** Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Fr. Edy Santoso, Eko P.W, Tino Adi Prabowo, Andi Al Hakim, Aminuddin Afif, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putu Chandra Anggiantara, Imam Joedono, Faisal Ismail, Aditya Arifianto. **Tim Redaksi:** Hadi Siswanto, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Ahmady Muhajiri, Dewi Rusmayanti, Iin Kurniati, Eva Lisbeth, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Arfindo Briyan Santoso, Wardah Adina, Danik Sulistyowati, Krisna, Cahya Setiawan, Nurul Fajar Dwi Yuwono, Mohamad Imron, Muparrih, Shera Betania, Purwito, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Putra Kusumo Bekti, Victorianus M.I. Bimo Adi, Yeti Wulandari, Novita Asri Hartati, Pradany Hayyu M., Irma Kesuma Dewi, C.S. Purwowidhu, Amelia Safitri, Abdul Aziz, . **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

## Reportase

25 SPAN, Milestone bagi Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara

26 DJKN Anugerahkan BMN Awadd 2014

## Wawancara

27 Ibu, Guru Pertama dan Utama

## Potret Kantor

30 Bekerja Ikhlas Sempurnakan Kualitas

## Figur

32 Cita Cita Tinggi Putri Pasundan

## Ekonomi Terkini

32 Ekonomi Diprediksi Tumbuh Lebih Tinggi

## Kolom Ekonom

40 Menciptakan DAK yang Berdaya

## Generasi Emas

44 Menjadi Generasi Solusi Ala Sharlini

## Opini

46 Mendefinisikan "Sukses" Pelaksanaan Proyek Pemerintah

## Regulasi

48 Manfaatkan Diskon PPH dalam Revaluasi Aset

## Laporan Utama

13 Habis Paket Terbitlah Target

16 Infografis

18 Waktunya Membangun

21 Yang Baru di APBN 2016

23 Memandang Target dengan Realistik

## Inspirasi

50 Musik adalah Passion Saya

## Renungan

52 Berhenti Bertanya

## Buku

53 Heaven's Bankers, Inside the Hidden World of Islamic Finance

## Jalan-jalan

54 Berburu Foto di Papandayan

## Selebriti

56 Pendidikan Nomor Satu

Foto Cover: Kukuh Perdana

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN  
PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Dalam rangka Investor Gathering & Pameran Investasi 2015

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

7 - 8 Desember 2015

Gedung Dhanapala, Kementrian Keuangan RI

Pukul : 08:00 - 17:00

**SEMINAR I :**  
STRATEGI PEMBIAYAAN DAN MARKET OUTLOOK 2016

**SEMINAR II :**  
PENGEMBANGAN PASAR SURAT BERHARGA NEGARA

**DISKUSI PANEL :**  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

**LOMBA CERDAS CERMAT**

**CAPACITY BUILDING BERSAMA  
DJOKO NUGROHO**



**PESERTA PAMERAN INVESTASI KEUANGAN**



Bersama  
MEDIA KEUANGAN  
Indonesia



INVESTOR GATHERING 2015  
Ballroom Dhanapala, 7-8 Desember 2015

[www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)

# APBN yang Realistis

**B**icara mengenai perekonomian, tahun 2015 merupakan tahun dimana kondisi ekonomi tidaklah mudah. Adanya kondisi ekonomi global yang mengalami krisis berdampak ke perekonomian Indonesia. Selain itu, Negara kita menghadapi penurunan harga komoditi, meski volume tetap sama. Pada semester I tahun 2015 dirasakan kegiatan ekspor menurun, demand menurun, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun dirasakan dimana-mana.

Pada semester II tahun 2015, pemerintah mulai mendorong perekonomian, dilihat dari penyerapan anggaran dan kondisi ekonomi yang mulai membaik. Percepatan anggaran jauh lebih baik dibandingkan dengan 2-3 tahun yang lalu. Perbaikan kondisi ekonomi di semester II juga lebih baik dari semester sebelumnya.

Apabila pola ini sudah terjadi, maka diharapkan bulan Januari 2016 mulai ada penyerapan anggaran. Secara garis besar, pemerintah sudah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi. Subsidi sudah dikurangi dan arahnya diubah ke infrastruktur, meskipun masih lambat.

Sejak 15 Agustus 2015 lalu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun 2016, beserta Nota Keuangannya dibahas bersama Pemerintah dan DPR secara intensif. RUU tersebut kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 Oktober 2015. Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR, asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2016 ditetapkan dan disepakati Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen; tingkat inflasi sebesar 4,7 persen; nilai tukar rupiah rata-rata Rp13.900/USD; tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen;

harga minyak mentah Indonesia rata-rata USD50/barel; lifting minyak rata-rata 830 ribu barel/hari; dan lifting gas rata-rata 1.155ribu barel setara minyak

Fokus APBN 2016 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu fokus pada infrastruktur. Selain itu juga mengubah arah konsumtif kepada hal-hal yang lebih produktif. Kemudian juga mendorong daerah untuk lebih maju dan tumbuh sesuai karakteristik daerah masing-masing. Lalu, pemerintah juga meningkatkan anggaran kesehatan mencapaisebesar 5 persen dari APBN 2016.

Pemerintah tentunya berharap tahun depan pertumbuhan ekonomi lebih baik dari tahun sebelumnya. Persiapan Kementerian/Lembaga (K/L) juga diharapkan lebih baik dalam mengeksekusi belanja-belanjanya.

*tweet*

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI**

Selamat sore, tweeps. Yuk, kenali anggaran negerimu tahun depan #APBN2016 #SadarAPBN

Apa saja potensi ekonomi unggulan di daerahmu? Bagian pendapatmu dengan tagar #OpiniAnda

**A Faid Syihabuddin @faidsyihab@@**

KemenkeuRI JEPARA yang memiliki beberapa pantai dengan pasir putih Dan pulau karimun jawa, sangat potensial untuk dikembangkan#OpiniAnda

**LPKKI @LPKKI1**

Paket kebijakan sangat dibutuhkan untuk mendorong minat rakyat kepada perbankan syariah #OpiniAnda

**@kueklepon**

@KemenkeuRI di kota #Batang ada petani ikan, ada pengrajin kapal, ada petani teh dengan harga beli yg masih minim, dan masih banyak lagi.

**@hayheyho**

@KemenkeuRI Industri Edamame alias kedelai Jepang di Jember perlu ditingkatkan lagi. Kualitas bagus, produk mendunia.





# Hujan Bukan Halangan

Foto:  
Muchamad Ardani

**D**i tengah hujan deras dan gemuruh petir, seluruh peserta diklat Customs Enforcement Team (CET) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengikuti upacara penutupan. Puncak acara diklat ditandai dengan penyematan brevet CET kepada peserta oleh jajaran pimpinan DJBC di lapangan tembak Ciampea, Bogor, Minggu (8/11). Selama satu bulan, para peserta mengikuti pelatihan tertulis dan praktek mengenai taktik penyergapan lawan serta praktek menembak.





# UANG DAN KEHIDUPAN

Ratusan gambar diseleksi dewan juri Lomba Foto Hari Oeang 2015. Tiga di antaranya terpilih sebagai juara, yang terbaik menerjemahkan tema “Uang dan Kehidupan”.



▲  
**Niat  
Tersembunyi**

---

Juara 2  
Indra Cahyadi,  
Kantor Wilayah DJP Riau  
dan Kepulauan Riau

---

◀ **Pesta Me'rok di  
Tana Toraja**

---

Juara 3  
Nathania Davita  
PKN STAN

---



◀ **Hidup  
adalah  
Perjuangan**

---

Juara 1  
Fajar Patriawan,  
Kanwil DJBC  
Jawa Tengah dan DIY

---



# 10/11

Teks  
Biro KLI

Foto  
Anas Nur Huda

## Kemenkeu dan BRI Perkenalkan Kartu Identitas Multifungsi

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) meluncurkan Kartu Identitas Multifungsi (KIM) pada Selasa (10/11). Dalam acara tersebut Menteri Keuangan melakukan penggungtingan pita didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Wakil Direktur BRI. KIM menjadi kartu identitas multifungsi yang juga dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran serta akses masuk ke lingkungan kantor. Ke depannya, KIM direncanakan dapat pula digunakan untuk akses kesehatan, pensiun serta data kepegawaian.

## 31/10 Kemenkeu Peringati Hari Oeang ke-69

Teks  
BIRO KLI

Foto  
Kukuh Perdana

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan upacara memperingati Hari Oeang (Uang) yang ke 69 di Lapangan Upacara Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, pada Sabtu (31/10). Hari Oeang yang jatuh pada tanggal 30 Oktober merupakan sebuah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. 69 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia yang berdaulat menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI). "Ini sebuah momen bersejarah dan penuh semangat patriotisme. Sejarah membuktikan bahwa ORI menjadi alat pemersatu bangsa sekaligus lambang kedaulatan negeri zamrud khatulistiwa," ujar Menkeu saat memberikan sambutan



## Metamorfosa STAN

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) telah resmi berubah menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 PMK 01/2015 STAN tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN secara resmi berubah nama dan struktur menjadi politeknik. Perubahan ini memberi dampak mendasar pada organisasi dan tata kerja. Pembinaan PKN STAN secara teknis akademik dilaksanakan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sedangkan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

# 09/11

Teks  
BPPK

Foto  
BPPK





# 10/11

Teks  
Biro KLI

Foto  
kukuh Perdana

## Kemenkeu Raih E-Procurement Award 2015

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo hadir menerima E-Procurement Award 2015 yang diberikan dalam Rakernas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2015 di Jakarta pada Selasa (10/11). Kategori yang diterima Kementerian Keuangan adalah Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, didampingi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo.



Daerah

# 12/10

Teks  
Biro KLI

Foto  
kukuh Perdana

## Kunjungan Kerja Menkeu ke Wonogiri

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro melakukan kunjungan kerja ke Wonogiri dalam rangka pemberdayaan UKM dan ekonomi kerakyatan pada Kamis (12/11). Hal ini dilakukan untuk memastikan hal-hal yang menjadi prioritas penanganan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pembangunan perekonomian, berjalan sesuai dengan program yang digariskan. Kemenkeu telah menugaskan lembaga-lembaga teknisnya, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), untuk menangani permasalahan mengenai serapan tenaga kerja oleh industri, dukungan pada UKM berorientasi ekspor, serta memberikan stimulus untuk pembangunan infrastruktur desa dan menjaga daya beli masyarakatnya.

Agenda

- 2/12 Keynote speech dalam Seminar Indonesia Oil dan Gas Outlook 2016
- 3/12 Hari Anti Korupsi, di DJP
- 6/12 Car free day dalam rangka Hari Anti Korupsi, di Dago Bandung
- 7/12 Launching Aplikasi Laporan dan Penandatanganan MOU dengan MAPPI, di Gedung Djuanda I, Kemenkeu
- 9/12 Seminar Internasional, di Bali
- 10/12 Investor Gathering Kemenkeu, di Dhanapala
- 10/12 Knowledge Sharing Leadership dengan Pejabat Eselon IV, di Gedung Djuanda I, Kemenkeu
- 10-11/12 Pekan Hari Anti Korupsi, di Saboga Bandung
- 11/12 Lelang Barang Gratifikasi (diselenggarakan oleh KPK & DJKN), di Saboga Bandung
- 14/12 OECD COP Meeting, di Paris
- 14/12 Penyerahan DIPA, di Istana Negara



## 28/10 DJKN Nilai aset Kabupaten Aceh Singkil

Teks  
DJKN

Foto  
DJKN

Kanwil DJKN Aceh terus diberikan kepercayaan untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah (BMD). Salah satunya adalah BMD yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Singkil. Tepatnya pada hari Rabu (28/10), naskah perjanjian kerjasama penilaian BMD pada Kabupaten Aceh Singkil ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Singkil dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh selaku kuasa dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

## 10/11

Teks  
DJKN

Foto  
DJKN

## Perwakilan Kemenkeu Jawa Barat gelar upacara Hari Pahlawan

Bertempat di Lapangan Tenis Gedung Keuangan Negara Bandung, Jalan Asia-Afrika No. 114 Bandung, Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Barat menggelar upacara bendera untuk memperingati Hari Pahlawan (10/11). Upacara kali ini bertemakan "Semangat Kepahlawanan Adalah Jiwa Ragaku" dihadiri perwakilan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat, Kanwil Pajak Jawa Barat 1, Kanwil Perbendaharaan Jawa Barat, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat, dan Balai Diklat Keuangan Cimahi.



## 04/11

Teks  
DJP

Foto  
DJP

## Barang Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Sumatra Utara

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memimpin pemusnahan rokok, minuman keras, obat-obatan dan kosmetik ilegal hasil penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Belawan. Pemusnahan dilakukan pada Rabu (4/11), barang-barang tersebut meliputi 3.157.575 batang rokok ilegal, 19.065 botol minuman keras (Minuman Mengandung Etil Alkohol/MMEA), 4.224 kaleng minuman keras, 2.827 krat minuman ringan, 1.431 koli obat-obatan, 14 karton obat-obatan, 437 buah kosmetik, dan 3 boks kosmetik.

# HABIS PAKET TERBITLAH TARGET

Pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan komitmen mengelola fiskal dengan lebih sehat. Untuk merespons ketidakpastian ekonomi global, sejak awal September hingga pertengahan November, tak kurang enam paket kebijakan ekonomi diluncurkan. Kebijakan inovatif berlanjut dengan ditetapkannya target pembangunan untuk pertama kali dalam APBN 2016.

**P**emerintahan Presiden Jokowi menunjukkan komitmen mengelola fiskal dengan lebih sehat. Untuk merespons ketidakpastian ekonomi global, sejak awal September hingga pertengahan November, tak kurang enam paket kebijakan ekonomi diluncurkan. Kebijakan inovatif berlanjut dengan ditetapkannya target pembangunan untuk pertama kali dalam APBN 2016.

Target pembangunan itu terdiri atas tingkat pengangguran pada kisaran 5,2-5,5 persen, tingkat kemiskinan 9-10 persen, indeks gini rasio 0,39, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 70,1. Ditemui Media Keuangan, Senin (9/11), Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa target pembangunan ini sama pentingnya dengan besaran asumsi ekonomi makro. "Target akan membuat jelas pedoman dan arah pemerintah dalam menyusun program dan juga jelas bagi DPR untuk mengawal serta melakukan pengawasan," kata Fadel.

Disahkan oleh pemerintah dan parlemen dalam Sidang Paripurna, Jumat (30/10), postur APBN memunculkan harapan. Asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3 persen, lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan sepanjang kuartal I-III tahun 2015. Asumsi-asumsi ekonomi makro lainnya adalah tingkat inflasi 4,7 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp13.900 per dolar Amerika Serikat (AS), tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, dan harga minyak mentah Indonesia rata-rata 50 dolar AS per barel. Sementara itu, lifting minyak diasumsikan 830 ribu barel per hari dan lifting gas 1.155 ribu barel setara minyak.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/11), Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan postur final APBN yang dibahas bersama antara pemerintah dan parlemen sejak Agustus lalu. Pendapatan negara yang

disepakati adalah Rp1.822,5 triliun dengan belanja negara Rp2.095,7 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp273,2 triliun atau sekitar 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada sisi pendapatan, pajak akan menjadi sumber utama, dengan prediksi dapat terkumpul Rp1360,1 triliun pada tahun depan. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai diharapkan menyumbang Rp186,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp273,8 triliun, dan penerimaan hibah Rp2 triliun. Pada sisi pengeluaran, belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp784,1 triliun dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa meningkat menjadi Rp770,2 triliun. Belanja non K/L dianggarkan senilai Rp541,4 triliun.

Sementara itu, dari rencana anggaran pembiayaan Rp273,2 triliun, sumber dari dalam negeri, terutama hasil penjualan surat berharga negara (SBN) akan menjadi penopang terbesar. Sumber tersebut diharapkan menghasilkan Rp272,8 triliun, sedangkan pembiayaan luar negeri ditargetkan hanya Rp0,4 triliun. Sumber pembiayaan luar negeri berfokus pada pinjaman bilateral dan multilateral yang tidak mengikat.

## Faktor eksternal dan internal

Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadaai perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok. Efek perekonomian Tiongkok tahun depan dinilai memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan faktor global lainnya, antara lain kebijakan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, The Fed. Jika perlambatan ekonomi negeri Tirai Bambu berlanjut, permintaan komoditas dari Indonesia ke sana akan menurun. Untuk itu, pemerintah berusaha mengubah jenis ekspor ke Tiongkok, yaitu dari ekspor barang mentah menjadi produk jadi. "Kita butuh mendorong ekspor produk



Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro didampingi jajaran pejabat Kementerian Keuangan memberikan keterangan pers tentang APBN 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Selasa (3/11)

**Foto**  
Anas Nur Huda

jadi ke Tiongkok karena itu yang sedang didorong, yaitu untuk konsumsi,” ujarnya.

Ditemui di tempat berbeda, pengamat ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa pelaku ekonomi global semakin baik menyesuaikan diri dengan kondisi yang tak pasti. “Jadi ekspektasi pasar itu, Tiongkok tidak akan lagi tumbuh sepuluh persen per tahun, tapi mungkin di bawah tujuh persen,” kata Febrio di kantor LPEM, Jakarta, Kamis (12/11). Terkait dengan ekspektasi The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga AS secara gradual, Febrio menilai kebijakan ini tidak selalu berdampak buruk. “Sebenarnya ini hal yang baik bagi emerging market, salah satunya adalah dominasi ekspor kita yang tadinya ke Tiongkok, sekarang bisa dialihkan ke Amerika Serikat,” ujarnya. Menurut Febrio, peralihan negara tujuan ekspor ini bahkan sudah terjadi pada 2015. “AS sudah jadi tujuan ekspor utama kita dari segi nilai,” Febrio melanjutkan.

Sementara dari sisi domestik, pemerintah menargetkan sumber pertumbuhan ekonomi dari kelanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mendorong kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Selain itu, tingkat konsumsi yang tetap kuat dan stabil juga akan menopang laju pertumbuhan ekonomi, dengan didukung oleh terjaganya laju inflasi dan daya beli masyarakat.

### **Memaksimalkan penyerapan**

Asumsi makro dan target pembangunan bisa dicapai jika penyerapan anggaran dilakukan secara optimal. Setelah APBN 2016 disahkan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar semua K/L segera memulai proses lelang. Penandatanganan kontrak, kata Menkeu, bisa dilakukan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) diterima, sebelum masuk tahun 2016. “Kalau lelang dilakukan sekarang dan kontrak bisa ditandatangani, katakanlah Desember, pada Januari pembayaran tahap pertama bisa dilakukan dan proyek sudah bisa dimulai,” ungkap Menkeu.

Penyerapan sejak awal tahun diharapkan akan memperbaiki kinerja APBN dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah berharap penyerapan anggaran pada APBN 2016 akan lebih baik, bukan hanya dilihat dari waktunya, melainkan juga besarannya. Untuk mempercepat gerak roda ekonomi di awal tahun, DPR menyetujui inisiatif pemerintah untuk mengambil kebijakan pre-funding. Seperti halnya penentuan target pembangunan, pembiayaan di awal tahun ini juga pertama kalinya diberlakukan dalam APBN. “Ini dilakukan untuk mencegah penumpukan belanja pada semester dua dan triwulan keempat yang menyebabkan terlambatnya eksekusi anggaran,” kata Menkeu.

Di dalam APBN 2016, pemerintah juga membuat ketentuan yang mengatur daerah

---

“Ini dilakukan untuk mencegah penumpukan belanja pada semester dua dan triwulan keempat yang menyebabkan terlambatnya eksekusi anggaran,”

Bambang P. S Brodjonegoro

---

dengan penyerapan kurang baik atau jelek, maka penyaluran dana transfernya dapat dilakukan dalam bentuk non tunai, misalnya melalui SBN. “Itu kalau penyerapannya jelek, tetapi jika penyerapannya baik dana transfer ke daerah disalurkan secara normal,” ungkap Menkeu. Inisiatif ini juga menjadi salah satu cara supaya mendorong pemerintah daerah secara optimal menggunakan anggaran.

Sebagai rekan kerja pemerintah dalam pengawasan penggunaan anggaran negara, Fadel dan rekan-rekannya di Komisi XI DPR menekankan perlunya peningkatan kapasitas kepala daerah dalam hal manajemen dan pengaturan penyerapan anggaran. Dengan besarnya dana transfer ke daerah dan dana desa, maka peran pemimpin daerah menjadi sangat vital. Fadel, yang sepanjang tahun 2015 terjun langsung ke daerah melakukan sosialisasi dana desa bersama pemerintah, menekankan perlunya penambahan intensitas kegiatan tersebut. Yang kedua adalah keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak awal dalam penyaluran dana desa. “Bimbingan perlu diberikan sampai tingkat lurah agar mereka tidak kena sanksi hukum,” ujarnya.

Terkait kinerja ekonomi, Fadel mengapresiasi tindakan pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang mendorong deregulasi dan debirokratisasi. Kemudahan di bidang pertanahan dan perpajakan, yang menjadi perhatian utama Fadel, diharapkan dapat mulai terasa dampaknya tahun depan.

### **Memacu proyek infrastuktur**

Persetujuan atas RAPBN 2016 menjadi APBN dicapai melalui rapat paripurna yang berlangsung amat panjang, lebih dari sepuluh jam, di pengujung Oktober lalu. Setelah disahkan, kini kesesuaian asumsi pertumbuhan dan ketercapaian target pembangunan akan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah mengelola APBN 2016. Ukuran lainnya adalah terpenuhinya rencana kerja pemerintah (RKP) tahun depan, yaitu mempercepat pembangunan infrastuktur untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan infrastuktur memang selalu penting. Dengan alasan ini pula, pemerintah merealokasi subsidi BBM pada akhir tahun lalu. Dalam sudut pandang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, kunci pembangunan infrastuktur bukan hanya pada pendanaan, melainkan juga persoalan kelembagaan, termasuk untuk mengurus sengketa pengadaan lahan. “Di Jawa Timur,

misalnya, ada kasus satu area sudah dibebaskan lahannya, tapi area yang lain tiba-tiba harganya naik dan akhirnya proyek berhenti. Ini jadi lucu, karena sepertinya pemerintah kalah dengan para spekulan,” kata Candra yang ditemui Media Keuangan di Malang, Jawa Timur, belum lama ini. Oleh karena itu, pada tahun mendatang, pemerintah harus menunjukkan ketegasan yang kuat karena pembebasan lahan dilakukan untuk kepentingan negara.

Secara umum, Candra menilai postur APBN 2016 sudah cukup baik. Stabilitas sosial politik dan koordinasi antarinstansi yang lancar, baik di pusat maupun daerah akan turut mendorong baiknya kinerja ekonomi. Target pertumbuhan 5,3 persen dipandang realistis. Semangat Nawa Cita, terutama membangun dari daerah, juga tampak nyata dengan besarnya dana yang ditransfer ke daerah. Senada dengan Fadel, kesiapan daerah dalam membuat belanja yang berkualitas juga menjadi catatan Candra bagi pemerintah.

Naiknya anggaran dana yang transfer ke daerah dan dana desa menjadi perhatian Candra. Integrasi program antara pemerintah pusat dengan daerah sangat penting. “Untuk program yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran, misalnya, itu harus in line, jangan sampai overlapping,” kata Candra.

Di samping itu, Candra juga menekankan perlunya kerja keras dan cerdas dalam memenuhi target penerimaan pajak. “Target tax ratio presiden pada masa kampanye sekitar 16,5 persen, sekarang baru 12,5 persen, maka upaya peningkatannya tidak bisa dengan cara biasa,” ujarnya. Perluasan basis Wajib Pajak, menurut dia, tak bisa ditunda lagi.

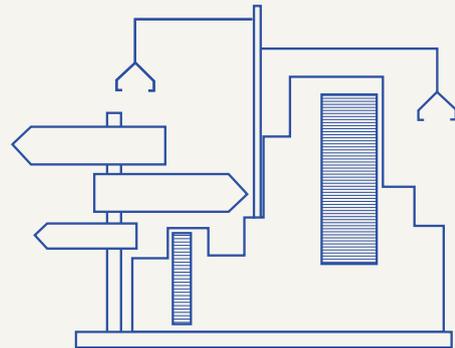
Dalam APBN 2016, pemerintah sendiri sebenarnya telah menyusun arah kebijakan umum perpajakan. Langkah untuk mencapai target perpajakan dipecah dalam tiga fokus utama. Pertama, ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi, dan daya beli. Selanjutnya peningkatan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan didukung perbaikan regulasi, administrasi, serta akuntabilitas. Yang ketiga dukungan insentif fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi nasional.

---

Teks Dwinanda Ardhi

# SIKLUS APBN

Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran.

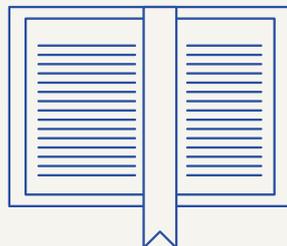


**JAN**

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

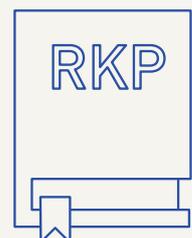
**FEB-MAR**

Review *Baseline* Penyusunan dan Penetapan Pagu Indikatif



**MEI**

Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) ke DPR serta Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)



**JUNI**

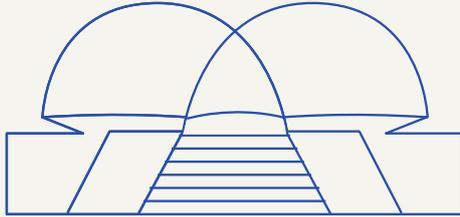
Penyampaian Pagu Anggaran



...

# OKT

Penetapan RUU APBN  
menjadi UU APBN  
di DPR

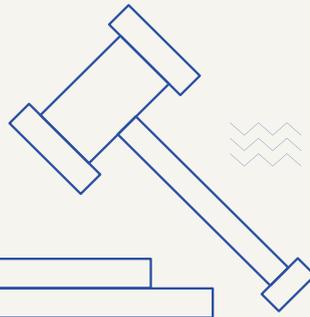


AGT

Penyampaian RUU APBN  
dan Nota Keuangan

NOV

Penetapan Perpres  
Rincian APBN



DES

Penetapan DIPA

TAHUN ANGGARAN  
SELANJUTNYA

Pelaksanaan Anggaran

...

# WAKTUNYA MEMBANGUN



Tahun 2016 menjadi awal mula bagi kabinet kerja menunjukkan performanya. Dengan mengusung konsep 'membangun dari pinggirannya', inilah saatnya pembangunan meluas ke seluruh pelosok nusantara.

**D**alam Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Tahap I yang diselenggarakan Kamis (26/3) siang itu, Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait menggarap draft rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016.

Dengan mengusung tema 'Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas', pemerintahan era baru mulai menunjukkan performanya. Selepas masa transisi, inilah langkah awal Kabinet Kerja menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 secara utuh.

Seusai sidang kabinet paripurna di istana negara, Jakarta, Senin (13/4), Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto mengemukakan bahwa APBN 2016 akan digunakan untuk membuat program pro-rakyat. "Membangun dari pinggirannya, itu yang ditekankan Presiden membuat perubahan di APBN 2016," ujarnya seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Hampir sebulan kemudian, pada Rakorbangpus Tahap II, pemerintah menyampaikan rancangan awal RKP tahun 2016 yang memuat pagu indikatif Kementerian/Lembaga. Saat itu, pagu indikatif belanja K/L pada 2016 ditetapkan sebesar Rp807,7 triliun, atau naik 1,5 persen dibanding APBN Perubahan 2015.

Sedikitnya empat sektor prioritas pembangunan nasional ditetapkan untuk mewujudkan arah kebijakan. Pertama, dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Kedua, dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan. Ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan. Terakhir, kondisi perlu berupa kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pertengahan Mei 2015, pemerintah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2016. Setelah itu, setiap K/L diwajibkan menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran sesuai pagu anggaran K/L tahun anggaran 2016 dan menyerahkannya kepada Menkeu melalui Dirjen Anggaran dan Menteri PPN/Kepala Bappenas paling lambat 10 Juli 2015.

Lalu tepat pada 14 Agustus 2015, Presiden menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN 2016 dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan asumsi

dasar ekonomi makro serta sejumlah kebijakan yang akan diambil tahun depan. Asumsi yang disampaikan ini diharapkan dapat mencerminkan kondisi perekonomian yang lebih realistis sehingga akan mendorong tingkat kepercayaan pasar yang lebih tinggi.

Akhirnya, pada 30 Oktober 2015, Pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan APBN 2016 menjadi APBN 2016 dengan pertumbuhan ekonomi diasumsikan capai 5,3 persen, laju inflasi dikisaran 4,7 persen dan nilai tukar rupiah Rp13.900 per dolar Amerika Serikat. Lalu, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan diasumsikan sebesar 5,5 persen.

Sementara itu, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 50 dolar per barel. Lalu, kapasitas produksi minyak diperkirakan capai 830 barel perhari sedangkan lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

Disisi lain, terkait target Pembangunan dalam APBN 2016, pemerintah telah menetapkan target kemiskinan sebesar 9,0-10,0 persen, gini rasio sebesar 0,39, dan Indeks pembangunan manusia 70,1. Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan turun dikisaran 5,2-5,5 persen.

#### Beralih basis ekonomi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara berpendapat bahwa pemerintahan era baru ini menjalankan dua logika, yaitu melakukan reformasi dan memberikan stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian. Untuk itulah dalam APBN 2016, Kementerian Keuangan berupaya melakukan reformasi anggaran dan memberikan stimulus fiskal guna mendorong perekonomian.

"Kita ubahnya kemana? Pindah dari penerimaan berbasis sumber daya alam (beralih) menjadi (penerimaan yang) mendorong kegiatan ekonomi. Berarti, kegiatan ekonominya harus kita buat lebih bergulir, lebih banyak, lebih cepat, lebih besar," ujarnya.

Dalam APBN 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.822,5 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.546,7 triliun, naik sekitar 3,9 persen dari APBN 2015 sebesar Rp1.489,2 triliun.

Untuk itu, tahun 2016, Kementerian Keuangan berupaya mengamanakan penerimaan pajak dengan melakukan optimalisasi pemeriksaan, kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Kementerian Keuangan juga akan mengimplementasikan tahun penegakan pajak yang dilakukan melalui

---

Rapat Paripurna  
DPR Pengesahan  
Undang-Undang  
APBN 2016

---

Foto  
Dok. Biro KLI

---

---

"..kita masih fokus ke infrastruktur, kedua yaitu belanja yang produktif misal tadi dari subsidi yang konsumtif seperti subsidi BBM kita arahkan ke produktif seperti infrastruktur, serta untuk mendorong daerah-daerah pinggiran"

Kunta Wibawa

---

penagihan aktif, pemeriksaan, dan penyidikan.

Selain itu, menurut Menteri Keuangan, pemerintah juga akan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty). "Tax amnesty itulah yang bisa memberikan ruang fiskal yang lumayan, baik dari segi penerimaan yang sifatnya langsung maupun basis pajak yang membesar," kata Menkeu saat konferensi pers APBN 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/11).

Dalam kebijakan penerimaan bea dan cukai, Kementerian Keuangan berupaya memperbaiki targeting objek audit, meningkatkan pengawasan, penindakan, dan penyidikan, serta meningkatkan operasi peredaran dan pengawasan barang kena cukai.

Selanjutnya, pemerintah menargetkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp273,8 triliun, turun sebesar Rp6,4 triliun dari RAPBN 2016. Kebijakan dibidang migas yaitu peningkatan perkiraan lifting minyak mentah dengan pengetatan jadwal proyek onstream, terutama mulai berproduksinya Blok Cepu, dan optimalisasi target lifting minyak mentah dan lifting gas bumi.

#### Defisit melebar

Dalam APBN 2016, pemerintah mengajukan defisit anggaran sebesar 2,1 persen, meningkat dibanding RAPBN 2016 sebesar 1,9 persen. Direktur Penyusunan APBN, Kunta Wibawa mengatakan bahwa pelebaran defisit APBN ini untuk percepatan pembangunan, peningkatan belanja serta mendorong daerah-daerah untuk tumbuh.

"Kalau tahun depan masih sama seperti 2015, kita masih fokus ke infrastruktur, kedua yaitu belanja yang produktif misal tadi dari subsidi yang konsumtif seperti subsidi BBM kita arahkan ke produktif seperti infrastruktur, serta untuk mendorong daerah-daerah pinggiran," jelas Kunta.

Tercatat, total belanja negara dalam APBN 2016 sebesar Rp2.095,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.325,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun. Belanja pemerintah pusat sendiri terdiri atas belanja K/L sebesar Rp784,1 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp541,4 triliun.

Terkait kebijakan belanja, pemerintah mengarahkan anggaran subsidi ke arah yang lebih tepat sasaran. Pertama, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur 2016 sebesar Rp313,5 triliun atau sekitar 8% dari total

belanja negara yang mencapai Rp2.121,3 triliun lebih besar dibanding 2015 sebesar Rp290,3 triliun.

Lalu, pemerintah tetap memenuhi anggaran pendidikan sebesar Rp419,2 triliun atau 20 persen dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Sesuai amanat Undang-undang, pemerintah juga meningkatkan anggaran kesehatan mencapai Rp104,8 triliun atau 5 persen dari APBN 2016.

Terkait kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah menaikkan anggaran sampai dengan 115,9 persen bila dibandingkan APBN Perubahan 2015, sehingga jumlahnya mendekati alokasi belanja K/L dalam APBN 2016. Pemerintah meningkatkan alokasi dana desa hingga 6 persen di luar transfer ke daerah sesuai road map dana desa 2015-2019.

#### Percepat eksekusi

Dalam APBN 2016, pembiayaan anggaran disepakati sebesar Rp273,2 triliun. Angka ini terdiri atas pembiayaan dalam negeri sebesar Rp272,8 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp0,4 triliun.

Direktur pengelolaan, pembiayaan, dan risiko, Scaider Siahaan menjelaskan bahwa rencana percepatan pembangunan sejak awal tahun akan berimplikasi pada peningkatan belanja sehingga kebutuhan dana akan bertambah. Untuk itu, pemerintah menerapkan strategi prefunding atau skema pembiayaan di awal tahun yang kali pertama akan diterapkan pada APBN 2016.

"Konsekuensi dari hal ini (percepatan pembangunan), dana SAL diperkirakan tidak cukup sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain. (Salah satu) Opsinya prefunding dilakukan melalui penerbitan SBN yang dilakukan pada kuartal 4 tahun 2015. Namun demikian, pelaksanaan prefunding akan dilakukan setelah aturan operasional dan penentuan besaran penerbitan SBN ditetapkan oleh Menteri Keuangan," jelasnya.

Selain skema prefunding, lanjut Scneider, tahun 2016 pemerintah kembali mengambil kebijakan pemilihan sumber pembiayaan dari luar negeri bilateral dan multilateral. Salah satu pertimbangannya untuk menjaga agar pemenuhan biaya defisit APBN tidak menyebabkan crowding out di pasar keuangan domestik, dan membantu cadangan devisa BI untuk menjaga nilai tukar rupiah.

---

Teks lin Kurniati  
Teks lin Kurniati



---

Pembangunan  
Jalan Tol Solo

---

**Foto**  
Aditya Arifiyanto

---

---

# YANG BARU DI APBN 2016

Membangun Indonesia dari pinggiran yaitu daerah dan desa menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo. Sebab itu, porsi keuangan pada APBN 2016 yang lebih besar ke daerah menjadi terobosan baru. Pembangunan infrastruktur di daerah akan menjadi roda penggerak ekonomi melalui berbagai investasi. Apalagi, kendala utama investor ke daerah selama ini adalah infrastruktur yang belum memadai.

---

“Sejak tahun 2001 daerah memiliki kewenangan terbesar dalam pembangunan di daerahnya. Mereka juga lebih tau kebutuhan prioritas rakyatnya”

mr saepulloh

---

#### Perubahan Transfer Ke Daerah

**P**ada APBN 2016 alokasi anggaran transfer ke daerah dan desa meningkat dari Rp664,6 triliun pada APBN 2015, menjadi Rp770,2 triliun. Angka ini berbeda tipis dengan anggaran Kementerian Lembaga sebesar Rp784,1 triliun. Perubahan pola belanja ini menekankan semangat desentralisasi agar pembangunan lebih merata dan cepat. Terkait hal ini, pemerintah juga akan melakukan sejumlah perbaikan termasuk memformulasi nomenklatur dana transfer, meningkatkan alokasi dana transfer khusus, dan implementasi “reward and punishment”.

Edy Suratman, ekonom Universitas Tanjungpura berpandangan kebijakan ini sudah benar. “Sejak tahun 2001 daerah memiliki kewenangan terbesar dalam pembangunan di daerahnya. Mereka juga lebih tau kebutuhan prioritas rakyatnya”, kata Edy. Di sisi lain, Raja Masbar ekonom Universitas Syahkuala menuturkan bahwa kondisi di daerah bervariasi. Ada yang siap namun ada pula sebagian yang belum siap. “Sebaiknya jangan terburu-buru, rencanakan dengan matang. Umumnya penyaluran dana yang cepat menghasilkan project yang mubazir. Spending quality harus dijaga”, ujarnya.

Senada dengan Raja, Abdul Hamid, ekonom Universitas Gajah Mada mengatakan Pemerintah Pusat harus meyakinkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Desa (Pemdes) bahwa secara administratif dan hukum mereka terjamin. “Tidak semua daerah siap menerima tanggung jawab besar. Oleh karena itu, harus di ‘back up’ oleh Pemerintah Pusat. Kalau Pemerintah Pusat sedikit lebih risk taker, maka Pemda dan Pemdes akan mengikuti dan mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih menggerakkan perekonomian dan pembangunan” tukas Abdul.

Sementara itu, Jabes Ezar Gaghana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara menambahkan, harus ada sinergi antara Pemda dan Pemdes sejak perencanaan agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat daerah. “Kami kira Pemda mampu mengelola dana itu asalkan ada petunjuk teknis yang jelas tentang penggunaan dana tersebut”, kata Jabes optimis.

#### Percepatan Proyek Infrastruktur

Agar eksekusi proyek-proyek dalam APBN 2016 dapat dipercepat, untuk pertama kalinya APBN 2016 menerapkan strategi prefunding atau penarikan utang di akhir tahun ini untuk kebutuhan awal tahun. Cara ini ditempuh agar

saat eksekusi, penumpukan anggaran belanja pada semester II triwulan IV dapat dicegah. RAPBN 2016 memiliki nilai belanja Rp 2.095,7 triliun.

Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, proyek-proyek infrastruktur yang ada, terutama yang sudah siap, harus diupayakan untuk dapat dimulai pada bulan Januari. “Kalau kita mengandalkan financing biasa itu repot karena penerimaan pajak bulan Januari masih terbatas dan masuknya juga mungkin di akhir bulan. Bagaimana dengan proyek yang sudah ditandatangani awal atau pertengahan bulan? Kita mau hindari mismatch ini sehingga proyek-proyek yang selama ini tertunda bisa dipercepat”, urainya.

Melalui prefunding pemerintah juga berharap pertumbuhan ekonomi tahun depan, terutama pada triwulan pertama. “Biasanya pada triwulan I pertumbuhan ekonomi suka drop karena peran pemerintah belum kelihatan. Kita berharap peran pemerintah itu lebih terlihat di triwulan I”, kata Menkeu.

Raja Masbar mengingatkan prefunding memiliki resiko kredit macet karena kontraktor bekerja tanpa modal. “Lebih baik dijadikan proyek multiyears supaya aman dan kualitas terjamin”, ujarnya. Sementara Abdul Halim optimis, selama sosialisasinya cukup memadai, maka kebijakan ini bisa jadi cukup efektif.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta empat Kementerian mempercepat eksekusi proyek infrastruktur di Kementerian masing-masing. “Presiden sudah kasih arahan agar Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, dan ESDM lebih cepat, karena empat kementerian ini yang proyek infrastrukturnya relatif banyak”, jelas Menkeu.

Kebijakan prefunding tertuang dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2016 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan, “Dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran pada awal tahun anggaran 2016, pemerintah dapat melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada triwulan keempat tahun 2015”.

Disamping itu, pemerintah juga tetap melakukan strategi front loading atau penarikan utang di awal tahun. Dengan begitu pendanaan akan aman hingga akhir tahun. Menurut Menkeu, mekanisme front loading yang sudah dikenalkan tahun ini terbukti efektif menangkal kondisi pasar yang lebih bergejolak di semester II sertaantisipasi dari masih rendahnya penerimaan pajak pada triwulan I.

---

Teks Irma Kesuma Dewi

# MEMANDANG TARGET DENGAN REALISTIS

APBN kuat, ekonomi menggeliat, rakyat sejahtera



**N**egara dengan pemerintahan yang stabil dan kuat tentu membutuhkan sebuah perencanaan anggaran yang kuat pula. Untuk itu pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penyusunannya, pemerintah tidak bisa melepaskan diri dari strategi kebijakan fiskal dan asumsi makro.

Setelah melakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya Rancangan APBN 2016 telah disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2016 pada 30 Oktober 2016 lalu. Simak wawancara Media Keuangan bersama Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mengenai target APBN 2016 hingga harapan implementasinya ke depan.

**Selain mencantumkan asumsi, saat ini APBN 2016 disertai dengan target. Bagaimana menurut Anda target yang ditetapkan pada APBN 2016 ini? Apakah realistis atau terlalu optimis?**

Kita membuat target berdasarkan angka-angka sebelumnya. Sempat terjadi perdebatan panjang untuk menentukan angka sebagai target. Akhirnya teman-teman (di DPR) berpendapat, kita realistis saja. Misalnya, kita melihat tingkat kemiskinan turun dari 11 persen menjadi 10 persen. Kemudian ada penurunan lapangan pekerjaan dan gini ratio. Kita realistis melihat

Foto  
Dok. Pribadi

---

"pemerintah harus memegang teguh prinsip-prinsip penggunaan anggaran, yaitu efektif, efisien, ekonomis, dan relevan"

---

angka-angka sebelumnya dan mematok berapa realisasi yang dikehendaki dengan anggaran 2.000 triliun.

#### **Bisa diceritakan bagaimana dinamika proses pengesahan APBN 2016 saat itu?**

Setelah semua memahami bahwa target diperlukan, maka semuanya (anggota DPR) mendukung. Angka-angka yang dibuat melalui diskusi panjang, hingga sampailah pada angka-angka ini.

#### **Apakah fundamental ekonomi kita cukup kuat untuk mencapai target APBN?**

Dulu ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), target pembangunan lebih gampang terbaca bersama-sama. Setelah GBHN tidak ada, kita malah bikin target pembangunan. Target pembangunan ini adalah ukuran masing-masing kementerian. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengukur indeks pembangunan manusia 70,1. Jadi semua kementerian harus punya ukuran masing-masing secara horizontal dan vertikal ke masing-masing daerah. Kalau hal itu dibuat, maka anggaran bisa dilaksanakan dengan baik. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, bisa atau tidak dilaksanakan. Untuk itu, kita minta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan mengontrol dengan ketat. Bappenas juga kami minta untuk meningkatkan kapasitasnya.

#### **Secara umum, bagaimana tanggapan Anda mengenai postur APBN 2016?**

Secara keseluruhan cukup baik namun ada beberapa hal yang dianggap masih belum pro rakyat. Maka, kita akan evaluasi pada April 2016. Saat ini kita setuju dahulu agar dana transfer daerah sudah berjalan. Ada beberapa juga masih belum beres, seperti mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dan subsidi. Kita lihat saja April nanti bagaimana. Tentu didasarkan dari berapa pendapatan yang masuk dan proyek-proyek yang sudah dilaksanakan pada Januari-Februari 2016.

#### **Dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, apakah Anda optimis kita bisa mencapai target APBN 2016?**

Saya melihat perekonomian sekarang tidak tumbuh seperti yang dikehendaki Presiden Joko Widodo saat kampanye, yaitu tujuh persen. Saat kita targetkan pertumbuhan 5,3 persen, menurut saya itu realistis. Itu saja yang kita dapatkan sudah cukup.

Bagaimana Anda melihat APBN 2016 ini

dibandingkan dengan tahun sebelumnya?

Dalam APBN 2016 terdapat inovasi kebijakan baru yang merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah, yaitu menetapkan Target Pembangunan. Hal ini yang sebelumnya tidak pernah ada. Perlu diketahui, APBN adalah instrumen kebijakan negara yang direpresentasikan dengan satuan nilai uang untuk mewujudkan target pembangunan. Ini adalah sebuah keputusan politik yang berlandaskan pada komitmen untuk membangun akuntabilitas yang lebih baik.

#### **Mengapa target pembangunan ini menjadi perhatian Komisi XI?**

Target pembangunan sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Hal tersebut memperlihatkan keberpihakan kita untuk mengatasi kemiskinan, menciptakan keadilan, mengatasi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja. Semuanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **Apa yang menjadi catatan penting Anda terhadap APBN 2016?**

Pasca reformasi kita telah mengubah sistem anggaran kita dari anggaran berimbang ke anggaran yang membolehkan adanya defisit. Untuk itu, pemerintah harus memegang teguh prinsip-prinsip penggunaan anggaran, yaitu efektif, efisien, ekonomis, dan relevan. Selama ini kita tidak terlalu menaruh perhatian apakah APBN kita sudah efektif, efisien, dan relevan dengan masalah-masalah yang hendak dipecahkan. Sebelumnya, kita hanya bersandar pada upaya pencapaian target belanja, bukan pada target pembangunan.

#### **Apa harapan Anda terhadap implementasi APBN 2016?**

Harapan saya ada tiga. Pertama, daya serap Pemerintah Daerah harus terlaksana dengan baik. Kedua, daya serap Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan bagus, terutama untuk infrastruktur. Ketiga, akuntabilitas anggaran supaya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tiga hal itu terlaksana, insya Allah kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat akan lebih baik, sehingga isu-isu negatif semakin berkurang.

---

**Teks Pradany Hayyu**



## SPAN, Milestone bagi Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara

Pembukaan  
Seminar  
Internasional

Foto  
dok. Biro KLI

**S**ejak diluncurkan secara resmi pada April lalu, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) telah memudahkan pencairan anggaran karena perubahan proses dari manual menjadi *online*.

Dalam seminar internasional bertema 'Unleashing the Potential of FMIS (Financial Management Information System) for Improved Government Effectiveness', Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan bahwa perubahan tersebut merupakan agenda reformasi.

"Kami bangga saat Presiden Joko Widodo meluncurkan SPAN di Istana Negara pada 29 April 2015. Peluncuran SPAN ialah salah satu *milestone* untuk agenda reformasi pengelolaan keuangan negara kita," kata Menkeu saat acara yang berlangsung di Aula Dhanapala, Jakarta pada Rabu (11/11).

Melalui sistem ini, lanjut Menkeu, Kementerian/Lembaga (K/L) lebih mudah mencairkan anggaran, bahkan

bisa kurang dari satu jam. Salah satu layanan unggulan yang disediakan SPAN ialah K/L dapat mengunggah Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) secara *online*, dan tanpa perlu lagi datang ke Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, proses manual pencairan anggaran hanya dapat dilakukan melalui 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di setiap daerah. Masing-masing satuan kerja (satker) K/L yang telah memiliki DIPA mengajukan surat untuk pencairan anggaran atau Surat Perintah Membayar (SPM). Dari SPM tersebut, pencairan dilakukan setelah mendapat dokumen anggaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu uangnya langsung ditransfer ke bank.

Pengembangan SPAN berawal dari mandat Menkeu selaku Bendahara Umum Negara untuk membangun sistem keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah yakin dengan penerapan SPAN akan memudahkan satker dalam proses pengelolaan penganggaran pendapatan

dan belanja negara.

Sejalan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, penggunaan SPAN dapat mendukung peningkatan transparansi dalam manajemen keuangan negara.

"Kita kembangkan SPAN untuk mendukung penerapan akuntansi (berbasis) akrual. Dengan menggunakan model SPAN, kami akan terus memperbaiki manajemen perencanaan, perbendaharaan, pajak, bea tarif, dan cukai. Satker mereka juga bisa awasi penerapan budget. Kami minta K/L menggunakan SPAN untuk menjaga anggaran," ujar Menkeu.

Dalam seminar ini, hadir sebagai peserta dari berbagai negara, institusi internasional seperti World Bank, The Europe Union, beberapa perwakilan kedutaan, OECD, IMF, JICA dan peserta nasional seperti DPR RI, serta pegawai Kemenkeu dan akademisi.

Teks Amelia Safitri



Penyerahan BMN Award 2014

Foto dok. Biro KLI

## DJKN Anugerahkan BMN Award 2014

Untuk keempat kalinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan apresiasi pada Kementerian/Lembaga (K/L) atas performa yang baik dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN). Dalam acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2014, dari total 86 K/L, Menteri Keuangan memberikan BMN Award pada 31 K/L.

Penghargaan yang diberikan di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/11) ini bertujuan memotivasi Kementerian/Lembaga untuk menjaga tren positif dan meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan BMN. Ke depan diharapkan, pengelolaan BMN semakin tertib, baik tertib secara administrasi, tertib fisik, maupun tertib hukum pada instansi masing-masing.

Apresiasi BMN Award ini terbagi dalam tiga kelompok berdasarkan jumlah satuan kerja (satker), yaitu kelompok pertama (1-10 satker), kelompok kedua (10-100 satker), dan kelompok ketiga (> 100 satker). Sementara terkait kategori, penghargaan ini terdiri atas dua

kategori, yaitu kategori tetap dan kategori pilihan. Kategori tetap meliputi Utilisasi BMN dan Kepatuhan Pelaporan, sedangkan kategori pilihan terdiri atas Pelaksanaan Sertifikasi BMN, Tata Kelola Berkesinambungan, Kolaborasi Pengelolaan BMN, dan Bandha Tadya Abiwada.

Untuk kategori Utilisasi BMN, pada kelompok pertama, penghargaan diberikan kepada LAN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan PPAK. Pada kelompok kedua, penghargaan diberikan kepada BKN, LIPI, dan BAPPENAS. Lalu, pada kelompok ketiga, penghargaan diberikan kepada BPS, KemLu, dan Kemenkeu.

Untuk kategori Kepatuhan Pelaporan, pada kelompok pertama, penghargaan diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kemenko Polhukam, dan MPR. Pada kelompok kedua, penghargaan diberikan kepada Badan POM, LIPI, dan BPK. Pada kelompok ketiga, penghargaan diberikan kepada Kemenkes, Kemenhut, dan BNN.

Untuk kategori Pelaksanaan Sertifikasi BMN, pada kelompok pertama, penghargaan diberikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Pada kelompok kedua, penghargaan diberikan kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan BPPT. Pada kelompok ketiga, penghargaan diberikan kepada Kementerian PU, Kemenag, dan POLRI.

Untuk kategori Tata Kelola Berkesinambungan, penghargaan diberikan kepada dua K/L, yaitu Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Luar Negeri. Kemudian, untuk kategori Kolaborasi Pengelolaan BMN, penghargaan diberikan kepada Kemenhan dan BPKP.

Terakhir, penghargaan Bandha Tadya Abiwada diberikan kepada BPKP yang menerima Bandha Tadya Abiwada Utama, Kementerian Pertahanan yang menerima Bandha Tadya Abiwada Madya dan POLRI yang menerima Bandha Tadya Abiwada Pratama. Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan kepada K/L yang secara konsisten mempertahankan performa dalam pengelolaan BMN, yang ditandai dengan diperolehnya penghargaan selama tiga tahun berturut-turut.

Teks Novita Asri



## *Ibu, Guru Pertama dan Utama*

---

**S**etiap tanggal 22 Desember, Hari Ibu diperingati untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu. Biasanya di hari ini, para suami dan anak menyiapkan hadiah untuk sang Ibu, sekaligus mengambil alih pekerjaan rumah tangga yang biasa ia lakukan. Bagaimana Negara memandang peran seorang ibu? Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



**Seperti apa peringatan Hari Ibu di berbagai negara?**

Mother's Day di negara-negara lain dirayakan secara santai. Saat saya tinggal di Australia, ucapan Happy Mother's Day bisa dilihat di mana-mana termasuk pesan singkat. Sementara di Indonesia, hari Ibu juga juga diperingati untuk melihat kembali jasa pejuang-pejuang perempuan Indonesia yang telah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, Hari Ibu di Indonesia biasanya diperingati secara resmi. Kita, para perempuan masa kini tetap melanjutkan perjuangan mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

**Seberapa besar peran seorang ibu?**

Dalam rumah tangga kalau tidak ada ibu saya pikir *useless*, rumah tangga itu mati. Masih lebih baik tidak ada bapak daripada tidak

ada ibu. Seorang ibu bisa saja menjadi kepala keluarga. Saya sudah tanya kemana-mana hingga ke pasar-pasar. Banyak ibu-ibu yang berjulan di sana berjuang mencari nafkah untuk keluarga sementara suami mereka hanya berdiam diri di rumah. Ibu adalah surga untuk keluarga dan untuk bangsa. Walaupun kita hidup di *men dominated society*, tetapi kedudukan ibu sangat penting sehingga harus dihargai dan dihormati. Saat ini perempuan seakan masih menjadi warga negara kelas dua, baik karena alasan agama maupun adat. *Mindset* ini yang harus kita ubah.

**Bagaimana kegiatan Anda sehari-hari Anda sebagai ibu yang *multitasking*?**

Saya tidak pernah menyerah. Sebagai seorang ibu saya harus melaksanakan tugas dalam rumah

---

Yohana Yembise,  
Menteri  
Pemberdayaan  
Perempuan dan  
Perlindungan  
Anak

---

**Foto**  
Kukuh Perdana

---



sekaligus memperhatikan masa depan saya. Bayangkan kalau suatu saat suami saya meninggal dunia, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Saya harus bekerja keras untuk anak-anak. Walaupun gagal saya tidak pernah putus asa. Saya harus lebih kuat lagi berjalan kedepan. Kalau ada adat yang tidak menunjang perempuan, kenapa harus dipegang? Bukan masanya lagi memegang adat yang seperti itu. Jadi saat saya berhasil menjadi guru besar pertama di Papua, itu merupakan hasil kerja keras yang luar biasa.

#### **Seperti apa Anda mendidik anak-anak?**

Marcia, anak perempuan pertama saya sudah mendapat gelar master dari Chicago dan saat ini bekerja di PT Freeport Papua. Putri kedua saya, Dina Maria, sedang mengambil jurusan *disaster management studies* (penanganan bencana) di London. Sedangkan

Bernie putra bungsu saya masih SMU dan tinggal bersama saya di Jakarta. Mengurus anak-anak adalah perjuangan besar. Seorang ibu selalu melihat anak-anak sebagai masa depan. Bagaimana agar mereka bisa mandiri dan membantu banyak orang.

#### **Adat apa paling menghambat perempuan Indonesia?**

Misalnya saja pembatasan jam malam bagi perempuan di Aceh. Aturan tersebut di luar aturan nasional. Mengapa harus ada peraturan seperti itu? Saya tidak mempermasalahkan bila setiap daerah memiliki kekhususan. Namun, jangan sampai kebijakan khusus di daerah mengabaikan hak-hak perempuan.

Saya tidak pernah menyerah. Sebagai seorang ibu saya harus melaksanakan tugas dalam rumah sekaligus memperhatikan masa depan saya. Bayangkan kalau suatu saat suami saya meninggal dunia, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Saya harus bekerja keras untuk anak-anak. Walaupun gagal saya tidak pernah putus asa.

Contoh lainnya, di Papua mas kawin seorang perempuan cukup mahal, bisa mencapai 100 juta Rupiah. Kalau laki-laki sudah mendapatkan seorang perempuan sebagai istri, dia seolah punya *power* untuk memperlakukan istrinya semaunya, termasuk memukul. Mengapa adat seperti itu dipegang terus? Nah, saat ini kami sedang mengkaji kebijakan-kebijakan khusus untuk menurunkan budaya seperti ini agar perempuan tidak menjadi korban. Harus ada pendekatan khusus terutama secara budaya dan agama untuk merubah *mindset* itu.

#### **Ada anggapan peringatan Hari Ibu nasional hanya seremonial. Seperti apa tanggapan Anda?**

Sebelumnya, kita memang melakukan acara resmi. Namun untuk tahun ini kami bersama Presiden akan turun langsung untuk bertemu dengan para ibu di lapangan, khususnya mereka yang rentan terhadap kekerasan. Para ibu yang sudah lanjut usia, yang kondisi ekonominya lemah, dan para ibu penyandang disabilitas akan kami ajak berkumpul bersama untuk memperingati Hari Ibu melalui bakti sosial. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain pemeriksaan kesehatan gratis serta sumbangan ke ibu dan anak yang kurang mampu.

#### **Menurut Anda, siapkah kaum ibu Indonesia menghadapi kemajuan zaman?**

Setelah lahir, seorang anak akan belajar dari ibunya, dimulai dari meniru bahasanya. Sebab itu, kita harus mengedukasi para ibu agar mereka bisa

membina anak-anak. Kita lihat, dalam pendidikan ibu adalah guru pertama dan utama dalam keluarga, sedangkan sekolah guru kedua.

Emansipasi kaum ibu Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Sudah banyak ibu yang berpendidikan dan turut berkarya untuk membantu ekonomi keluarga. Meski begitu masih banyak yang perlu dibenahi. Masih ada kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, ekonomi, dan psikis. Kesehatan reproduksi wanita juga masih rentan. Pelecehan seksual dan perdagangan manusia, khususnya perempuan masih terus terjadi. Semua ini harus dilawan.

Kita akan meluncurkan kampanye 'He For She' yaitu laki-laki untuk perempuan. *He For She* adalah kampanye global mengenai solidaritas untuk kesetaraan *gender* yang diprakarsai oleh UN Women. Tujuannya adalah melibatkan laki-laki muda dan dewasa sebagai agen perubahan untuk mengambil tindakan terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan. Pendidikan seperti ini harus dimulai dari unit terkecil yaitu rumah.

**Teks Irma Kesuma Dewi**

# Bekerja Ikhlas Sempurnakan Kualitas

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang



Gedung KPKNL  
Padang.

Foto  
Bagus Wijaya

**M**asyarakat Indonesia umumnya segera mengasosiasikan kota Padang, Sumatera Barat dengan etnis Minangkabau dan masakan khasnya yang lezat. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang. Di kota inilah, sejak tiga tahun terakhir Subur Bahariyanto memimpin Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang. Berkat tangan dinginnya, kantor yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan ini berhasil meraih peringkat ketiga dalam lomba Kantor Pelayanan Percontohan (KPPC) di Lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2015.

## Penataan Kantor

Gedung kantor KPPN Padang sudah ada sejak tahun 1978. Selama bertahun-tahun penataan ruang kantor kurang efisien.

Pengguna layanan harus masuk terlebih dahulu ke dalam *lobby* utama, berbelok melewati ruang kerja pegawai, sebelum kemudian menuju ke ruang layanan. Pada 2013, Subur kemudian merombak *layout* kantor menjadi lebih praktis. Pertimbangannya adalah jarak terpendek, proses rangkaian kerja, serta penggunaan setiap ruangan.

Diceritakan oleh Subur, memperbaiki kinerja kantor tidak mudah. Subur mencontohkan, saat dirinya berencana menata ulang *layout* kantor, banyak pertentangan dari para pegawai. Perlu argumentasi yang masuk akal yang tentunya menuju perbaikan. Secara aturan, Satuan Kerja (Satker) yang dilayani tidak boleh berhubungan langsung dengan pegawai, sementara Kota Padang termasuk daerah yang rawan gempa. "Pada *layout* ruangan yang terdahulu, jika terjadi gempa, pegawai dan pengguna layanan akan susah lari keluar dan

terkurung bersama. Dalam keadaan terpaksa, hanya bisa memecahkan kaca jendela. Akhirnya kami siapkan ruangan dengan pintu tambahan. Dengan begitu, jalur evakuasi kami akan lebih mudah”, tutur Subur.

### Inovasi Layanan PASTI

Agar hubungan dengan *stakeholders* terjaga baik, setiap awal tahun KPPN Padang mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menandatangani pakta integritas. Pada momen itulah sosialisasi pemahaman mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan. Forum ini juga menjadi ajang silaturahmi. “Ketika ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, kami juga mengundang *stakeholder* agar mereka memahami ketentuan yang berlaku”, ungkap Subur. Saat ini KPPN Padang mengelola dana sekitar Rp 8,5 triliun dari 374 Satker.

Agar informasi yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat umum lebih luas, KPPN Padang melakukan publikasi melalui Televisi Republik Indonesia. Tidak hanya dalam bentuk berita, namun juga dalam format bincang-bincang. “Selama ini masyarakat menganggap layanan KPPN berbelit-belit dan cenderung ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan dialog interaktif, hal-hal seperti ini bisa langsung kita jelaskan”, tutur Subur.

Bagi *stakeholder* yang memiliki berbagai keperluan terkait perpajakan, KPPN Padang menyediakan Pojok Layanan Bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Sambil menampung pertanyaan, keluhan, ataupun saran dari pengguna jasa, pojok khusus ini juga dimaksudkan untuk mengawal kepatuhan dan peningkatan penerimaan pajak.

Ditanya mengenai mutu layanan, Subur mengungkapkan masih ada budaya kerja yang memperhitungkan untung rugi, termasuk tenaga. Padahal, jika petugas layanan bekerja dengan tidak ikhlas, hasilnya pun tidak akan optimal. Oleh sebab itu, KPPN Padang mengusung janji layanan ‘PASTI’ yang merupakan singkatan dari Profesional, Akurat, Santun, Terpercaya, dan Ikhlas. “Usahakan agar *stakeholder* betul-betul puas dengan pelayanan kita. Setiap permasalahan harus ada solusinya sehingga pengguna layanan pulang dengan senang hati”, ujarnya.

R. Wiwieng Handayaningsih, Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan mengatakan, kualitas layanan KPPN Padang memang sudah semakin baik. Wiwieng berharap penghargaan ini dapat memacu dan memotivasi KPPN lainnya. Terlebih lagi kantor percontohan turut menjadi alat ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan.

### Pengembangan SDM

KPPN Padang pada baru saja menerima enam orang pegawai baru. Sebelum mulai bekerja, semua pegawai baru tersebut diikutsertakan pada orientasi budaya kerja. Selain pemahaman tugas pokok di KPPN, orientasi tersebut juga menekankan pada cara berkomunikasi dan berperilaku sesuai etika kerja. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan bisa ditanamkan sejak dini.

Diakui oleh Subur, untuk pelatihan yang sifatnya teknis terkendala pembatasan jumlah pegawai yang boleh diikutsertakan. Meski begitu baginya hal ini tidak menjadi masalah. “Informasi teknis mudah dipelajari, tetapi membentuk karakter positif itu sulit. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, apa yang bisa kita berikan kepada pemerintah dan masyarakat?”, tanya Subur.

Saat ini KPPN Padang didukung oleh 41 orang pegawai, 13 orang diantaranya adalah wanita. Terdapat tiga orang lulusan Sekolah Menengah Pertama, tujuh orang dari Sekolah Menengah Atas, dan sisanya D3 serta Sarjana. Sekitar separuh pegawai adalah penduduk asli Sumatera Barat, sedangkan sisanya berasal dari berbagai kota lain di Indonesia. Meski multietnis, namun kegiatan kebersamaan selalu dibangun. “Kami sering kumpul dan makan *bareng*. Sesekali kami melakukan *family gathering* sambil berwisata. Secara tidak langsung rasa kekeluargaan tercipta sehingga suasana kerja semakin nyaman,” tutup Subur.

Yudi Pramadi, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana selaku ketua tim menilai mengingatkan pentingnya fungsi KPPN dalam melayani pencairan dana APBN, penatausahaan setoran penerimaan negara dan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah. “Kinerja KPPN akan selalu mendapat perhatian *stakeholder*, baik pihak swasta maupun Kementerian/Lembaga”, tegas Yudi.



Kepala KPKNL Padang.

Foto Bagus Wijaya

Teks Irma Kesuma Dewi





N.E. Fatimah

# Cita Cita Tinggi Pubi Pasundan

*Tekadnya hanya satu, bersekolah setinggi-tingginya.  
Wanita ini tak hanya berani bercita-cita, namun juga berani  
mewujudkannya.*

**E**uis Fatimah Azzahra dibesarkan di lingkungan keluarga yang agamis. Kakeknya mengasuh sebuah pondok pesantren di Garut. Keseharian masa kecil Euis dihabiskan dengan sekolah, mengaji, dan bermain badminton serta voli. Cita-citanya saat itu hanya lulus dengan nilai terbaik. Mimpi itupun disertai dengan kerja keras Euis. Semasa sekolah, ia selalu mendapat nilai tertinggi. Masa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama Euis dihabiskan di Cicalengka, Bandung. Sedangkan ia berpindah ke Tasikmalaya saat memasuki tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), tepatnya di SMA 1 Tasikmalaya.

Selepas SMA di tahun 1982, Euis mengikuti seleksi penerimaan pegawai Kementerian Keuangan. Ia pun dinyatakan lolos. Ada cerita unik saat penempatan Euis di Kementerian Keuangan. Ketika dinyatakan lolos seleksi dengan nilai 10 besar terbaik, ia diminta memilih unit kerja di

Kementerian Keuangan. “Waktu itu saya ditawari mau di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apa di Direktorat Jenderal Pajak. Saya tidak tahu karena tidak ada sosialisasi tugas dan fungsi unit tersebut. Lalu saya bilang mau ditempatkan di kantor yang ada lapangan voli atau badminton,” ujarnya tertawa. Akhirnya, Euis menempati penempatan tugas pertamanya di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bandung, dengan lapangan voli dan badminton tentunya.

Hobi bermain voli dan badminton memang tidak bisa dipisahkan dari keseharian Euis. Seusai jam kerja, hampir setiap hari ia bermain voli atau badminton. Kesibukan bekerja tak membuat ibu dari Guggie Yudhistira ini lupa untuk melanjutkan sekolah. Setelah mencari-cari informasi kampus yang menyelenggarakan kuliah sore, akhirnya ia mendaftarkan diri ke Lembaga Administrasi Negara (LAN). Setelah menjalani kuliah S1 di LAN selama satu tahun, Euis juga mendaftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

#### Perempuan harus sekolah

Keseriusannya untuk belajar lebih banyak membuat Euis bersemangat

melanjutkan sekolah. Pada tahun 1987, ia lulus secara bersamaan dari LAN dan STAN dengan nilai yang memuaskan. Euis beranggapan, wanita harus bersekolah setinggi-tingginya. “Banyak hal yang menjadikan perempuan kaum *marginal*. Di keluarga saya contohnya, yang duluan bersekolah itu laki-laki. Perempuan nanti saja, *kan* tugasnya mengurus rumah. Hati kecil saya memberontak, kenapa perempuan tidak boleh (sekolah),” tegasnya.

Euis sedari kecil memang terkenal *tomboy*. Ia hobi bermain layang-layang bersama saudara-saudaranya yang semuanya laki-laki. Di sekolah pun Euis melihat dengan jelas, jumlah kaum perempuan lebih sedikit dari laki-laki. “Ini yang membuat saya terpacu untuk berprestasi di sekolah. Kalau dulu ada istilah bintang pelajar ya, hampir semuanya adalah laki-laki. Saya harus bisa, perempuan harus bisa,” tuturnya bersemangat.

Keinginannya untuk terus bersekolah dan berprestasi selalu melekat hingga ia bekerja di Kementerian Keuangan. Banyak orang merasa terkurus waktunya dengan hanya bekerja di kantor. Namun tidak bagi Euis. Ia berusaha mengatur waktu sedemikian rupa agar selain bekerja juga bisa bersekolah lagi. “Di kantor,

saya melihat perempuan kebanyakan hanya ditempatkan di bagian administrasi. Kenapa perempuan tidak boleh jadi pemeriksa pajak. Kalau alasannya karena penuh risiko *kan* itu bisa disiasati,” jelasnya.

#### Ijazah yang ditolak

Tahun 1993 Euis mendaftarkan Program Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Ada peristiwa pahit yang dialami Euis saat berhasil menyelesaikan kuliahnya. Pihak Kanwil DJP Jawa Barat tidak menerima ijazahnya. “Ini sekolah apa? Kok tidak ada kata-kata pajaknya?” tutur Euis menirukan atasannya kala itu. Euis mengenang, ia hampir saja merobek ijazahnya karena kesal. Namun buru-buru niat buruk itu ia enyahkan. “Sayang juga kalau dipikir. *Susah-susah* saya sekolah *kok* ijazahnya dirobek,” kenangnya sembari tertawa.

Berdasarkan saran atasannya, akhirnya Euis kembali mengambil Program Magister Universitas Indonesia jurusan Kebijakan Administrasi Perpajakan pada tahun 1997. Euis beranggapan tidak semua pegawai pajak harus memiliki latar belakang sekolah perpajakan. “Pajak harus disosialisasikan ke masyarakat. Semua orang yang berpenghasilan wajib melapor ke negara. Jadi petugas pajak tidak hanya berlatar belakang pendidikan ekonomi saja, seperti psikologi atau kedokteran juga bisa,” jelas wanita yang pernah menjadi presenter acara perpajakan di Televisi Nasional Republik Indonesia (TVRI) pada tahun 2003 ini.

Euis tak pernah mengeluhkan kehidupan. Ia hanya mengenal kerja keras dan sekolah giat. Uniknya, wanita yang selalu menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) saat SMP dan SMA ini beberapa kali ditempatkan di kantor baru. Pada tahun 1990 Euis diangkat menjadi pemeriksa pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Cirebon yang notabene merupakan kantor baru. Kemudian, pada tahun 1991 ia dimutasi ke KPP Cimahi dan tahun 1993 ke Karikpa Bandung 1 yang keduanya



N.E. Fatimah saat mendampingi Menteri Keuangan pada salah satu Kunjungan Kerja

Foto dok. Biro KLI

#### PENDIDIKAN

DOKTOR — UNIVERSITAS  
PADJAJARAN  
Bandung 2002 Doktor  
dalam bidang Administrasi  
Negara Bidang Kajian  
Utama Kebijakan publik,  
Pascasarjana, Universitas  
Padjajaran, Bandung.  
MAGISTER — UNIVERSITAS  
INDONESIA  
Jakarta 1998 Magister Ilmu  
Administrasi, Pascasarjana  
Bidang Kajian Utama,  
Kebijakan Administrasi  
Perpajakan, Universitas  
Indonesia, Jakarta.

#### RIWAYAT JABATAN

Kepala Subdirektorat  
Kerjasama dan Kemitraan  
Direktorat Jenderal Pajak  
(2009-2011)  
Tenaga Pengkaji Bidang  
Pelayanan Perpajakan  
Direktorat Jenderal Pajak  
(2011-2015)  
Kepala Biro Komunikasi dan  
Layanan Informasi Sekretariat  
Jenderal (2015-sekarang)

adalah kantor baru. “Kebetulan saya selalu ditempatkan di kantor baru. Kerjanya berbenah terus,” kata Euis tergelak.

Menjelang Pemilihan Umum di tahun 1998, Euis mendaftar sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tidak susah baginya untuk membagi waktu antara bekerja sebagai pegawai pajak dan wakil sekretaris utama Panwaslu. “Senin sampai jumat saya bekerja di kantor pajak, baru sabtu dan minggu di Panwaslu,” tuturnya. Ada hal menarik dari Euis yang tidak dimiliki oleh semua pegawai pajak. Ia memosisikan dirinya sebagai birokrat pajak yang harus mensosialisasikan pajak kepada siapapun dan di manapun. Tak terkecuali saat bekerja sebagai Panwaslu. “Saat bekerja sebagai Panwaslu, saya bertemu banyak peserta pemilu, calon legislatif, gubernur, dan bupati. Mereka adalah target sasaran sosialisasi pajak. Sosialisasi ini perlu dilakukan supaya mereka tahu kalau penghasilan harus dikenakan pajak,” ujar Euis dengan semangat.

#### Kuliah S3 penuh perjuangan

Bukan Euis namanya jika hanya berdiam diri menikmati pekerjaan. Pada tahun 2000, ia memberanikan diri mendaftar program Doktor Universitas Padjajaran Bandung. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kanwil DJP Bandung. Tekad kuatnya ternyata mendapat banyak cibiran dari teman-teman di sekitarnya. Pasalnya, di lingkungan Kementerian Keuangan Euis adalah wanita pertama yang masuk Program Doktor tanpa jalur beasiswa. “Sampai ada gosip saya mau jadi direktur jenderal. Saya tidak memedulikan komentar orang, yang penting Allah rida dengan yang saya kerjakan,” tuturnya.

Saat itu Euis memperhatikan perilaku para pegawai wanita saat jam istirahat. Kebanyakan menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan. “Daripada ke *mall*, lebih baik saya cari waktu buat sekolah saja,” jelasnya. Universitas Padjajaran pun dipilihnya karena dekat dengan kantor. Euis seakan tak ingin kehilangan waktu dan kesempatan. Menurutnya, mendapatkan beasiswa kala itu tak semudah sekarang. Daripada menghabiskan uang dengan belanja, ia memilih melanjutkan S3 dengan biaya mandiri.

Perjuangan Euis yang bekerja sambil kuliah S3 tidaklah mudah. Ia harus pandai-pandai mengatur waktu di tengah kesibukan sebagai kepala seksi. Untungnya, jam kuliah masih bisa disisipkan di tengah jam kantor. Seringkali sang dosen meminta kuliah dimulai jam enam

pagi atau jam 12 siang. “Saya sudah izin kepada pimpinan kalau mau kuliah. Untungnya pimpinan sangat mendukung,” ujarnya sembari tersenyum.

Saat menjelang ujian, Euis mengaku mendapat perkataan kurang mengenakkan. “Ikut saja ujiannya, paling kamu tidak lulus,” tutur Euis menirukan komentar sang dosen kala itu. Tak pelak ia merasa sedih dan sakit hati. Saat shalat tengah malam, Euis berdoa sambil merenungkan perkataan dosennya. Namun tiba-tiba terhenyak, bagaimana bisa lulus kalau saya belum berusaha. Hal itupun memicu dirinya untuk belajar lebih giat demi mempersiapkan ujian. Ia jadi teringat perkataan orang tuanya, “Kita harus seperti bola bekel. Semakin keras dilempar, semakin tinggi lompatnya. Semakin sakit kita ‘dibanting’, semakin harus bersabar dan terus bangkit.”

Tibalah hari pengumuman ujian prelim (ujian mahasiswa Program Doktor). Akhirnya Euis mendapat kabar gembira dari rekannya. “Neng (panggilan Euis), kamu lulus!” kata temannya memberi tahu dengan semangat. Tak kuasa menahan haru dan heran, Euis bangga dengan pencapaian dirinya. “Ujian prelim itu seperti hantu. Menakutkan saat ditunggu-tunggu, tapi begitu lulus langsung bingung,” ujarnya.

Euis yang lebih akrab disapa Neneng ini dikenal memiliki pergaulan luas. Tidak hanya di lingkungan DJP, namun juga Universitas Padjajaran, Panwaslu, hingga Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini membuatnya perlahan-lahan memahami dunia politik. “Mengerti politik itu penting. Supaya kita tahu bagaimana *mindset* para politikus terhadap pajak dan bagaimana pajak dapat dimengerti oleh mereka,” jelasnya. Euis mengakui, tak banyak pegawai DJP yang berani menyebut identitasnya di muka umum. Namun Euis memiliki pandangan berbeda. Di setiap kesempatan, ia selalu memperkenalkan diri sebagai pegawai DJP. Hal itu semata-mata demi mensosialisasikan pajak kepada semua kalangan, mulai dari masyarakat awam hingga pejabat tinggi. Bahkan ia sempat menjelaskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). “Saya begitu senang, bu Ani (Yudhoyono) kalau ketemu saya jadi selalu ingat untuk membayar pajak,” tuturnya sembari tersenyum.

# Ekonomi Diprediksi Tumbuh Lebih Tinggi

“Dalam lima tahun ke depan diharapkan muncul pertambahan dua persen pertumbuhan secara global, tapi ini tidak mudah,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11).

Jumpa wartawan itu diadakan sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Antalya, Turki untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Meskipun berat, lanjut Menkeu, “Ini tetap jadi komitmen G20.”

Pada KTT G20 yang berlangsung 15-16 November, Presiden Jokowi akan menyampaikan suara *emerging market* sekaligus suara Indonesia sebagai negara anggota G20. Menurut Menkeu, Presiden Jokowi akan menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan yang sudah digaungkan sejak pertemuan G20 di Australia, tahun lalu. “Indonesia ingin jadi bagian dalam upaya tersebut,” ujarnya.

Perekonomian global sepanjang 2015 memang masih berada dalam bayangan ketidakpastian. Sebab utamanya adalah pengaruh keputusan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed yang masih menunda-nunda kenaikan suku bunganya. Kondisi kian tidak pasti karena di belahan benua yang lain, raksasa ekonomi dunia, Tiongkok, dihantui perlambatan.

Di dalam negeri, dampak situasi global itu terasa pada kelesuan perekonomian. Dari data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi dengan dasar perhitungan Produk Domestik Bruto sepanjang triwulan I-III berturut-turut hanya berkisar pada empat persen, yaitu 4,72; 4,67; dan 4,73 persen. Dalam kelesuan, pemerintah tidak tinggal diam. Beragam paket kebijakan diluncurkan sejak awal September. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi komitmen menggerakkan ekonomi dalam negeri. Berbagai insentif dijanjikan, rantai perizinan yang ruwet dipangkas, serta proyek-proyek infrastruktur dipercepat pengerjaannya.

Dalam perbincangan dengan Media Keuangan bulan lalu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazarra mengungkapkan bahwa Indonesia memang perlu mencari penggerak ekonominya dari dalam negeri. Faktor eksternal tak bisa dikendalikan, sehingga pembenahan dari dalam mutlak dilakukan. Selain melalui

berbagai paket kebijakan, pemerintah juga melakukan reformasi anggaran yang mencakup reformasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Menginjak triwulan IV, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan lebih baik. Tren ini diramalkan berlangsung hingga tahun depan. Berdasarkan rilis Bank Indonesia yang dikeluarkan Kamis (5/11), perbaikan ekonomi akan bertopang pada peran pemerintah. Misalnya, melalui akselerasi pelaksanaan proyek infrastruktur yang mampu mendorong kinerja investasi. Investasi swasta diharapkan ikut meningkat sejalan dengan rangkaian paket kebijakan yang mendukung iklim dunia usaha. Sementara itu, kinerja konsumsi diperkirakan membaik seiring dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak pada bulan Desember. Selain itu, pelonggaran kebijakan makroprudensial juga diperkirakan akan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi pada triwulan terakhir tahun ini.

Angin segar juga berhembus setelah belum lama ini Bank Dunia merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 sebesar 5,3 persen. Meskipun demikian, angka pertumbuhan yang cukup tinggi ini disertai sejumlah risiko, mulai dari kemungkinan naiknya suku bunga Amerika Serikat, perlambatan di negara-negara mitra dagang, pelemahan di sektor swasta akibat depresiasi nilai tukar dan berkurangnya margin keuntungan, serta kemarau akibat pola cuaca El Nino. Untuk menghadapi volatilitas ekonomi global, Bank Dunia menyebut pemberian stimulus, reformasi kebijakan, dan peningkatan kualitas belanja negara sebagai pilihan kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah.

Ditemui di kantor Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Kamis (12/11), Peneliti sekaligus Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional atau *emerging market* yang lain, kinerja ekonomi



Indonesia sebenarnya tak terlalu buruk. “Jika saya bandingkan dengan Brazil, *wah* mereka ‘berdarah-darah’ di sana, sudah resesi sejak tiga kuartal terakhir. Belum lagi dengan ekonomi Rusia dan Afrika Selatan,” kata dia.

Dalam penilaian Febrio, yang juga mendingan kondisi ekonominya adalah India. Namun, pertumbuhan ekonomi di negeri Taj Mahal itu tak pernah benar-benar tinggi dan kecenderungannya stabil di kisaran lima persen. Pada 2016, proyeksi LPEM untuk pertumbuhan ekonomi tanah air tidak jauh berbeda dengan rilis dari sejumlah lembaga, yaitu sebesar 5,2 persen.

Selain berpotensi tumbuh pada tahun depan, Febrio menegaskan bahwa perekonomian Indonesia jauh dari krisis. “Sebenarnya sudah salah kaprah kalau ada pihak yang menyebutkan ekonomi kita krisis,” ujarnya. Secara prinsip, salah satu tanda krisis adalah jika PDB tumbuh negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Sementara kondisi itu

tidak terjadi pada ekonomi tanah air.

Saat ini, pelaku pasar justru melihat Indonesia relatif kuat secara ekonomi, terutama dilihat dari pangsa pasar yang besar. Kondisi ini dapat dilihat sebagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi di dalam negeri. “Untuk tujuan penjualan, pasar domestik sebenarnya lebih bagus karena kita punya *middle class* besar,” kata Febrio.

Investor dan pelaku usaha sebenarnya juga sudah membiasakan diri dalam ketidakpastian ekonomi. Kondisi ekonomi global beberapa tahun terakhir telah membawa mereka menemukan titik *the new normal*. Pada 2016, pelaku usaha dan pasar diyakini sudah semakin percaya diri. Dengan demikian, mereka diharapkan melakukan perencanaan dan investasi dengan keyakinan yang lebih. Investasi pemerintah di sektor infrastruktur akan sangat berpengaruh dalam mendorong iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif.

---

Investasi pemerintah di sektor infrastruktur akan sangat berpengaruh dalam mendorong iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif.

---

**Foto**  
Kukuh Perdana

---



**Febrio Kacaribu**  
Peneliti LPEM FEB  
Universitas Indonesia

**P**eran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian paling bagus dalam pembangunan infrastruktur. Investasi di bidang infrastruktur akan membuat biaya logistik makin rendah dan pasar semakin aktif. Jika pemerintah menepati janji untuk mempermudah perizinan, sektor industri akan tumbuh lebih cepat.

Pembangunan infrastruktur juga membuka lapangan kerja, sehingga *instead of just giving money as a cash transfer*, pemerintah akan memperoleh *multiplier effect* dari proyek infrastruktur pada jangka panjang. Kegiatan semacam *infrastructure summit* harusnya lebih sering diadakan. Misalnya untuk proyek yang

direncanakan untuk dijalankan pada 2016-2017, sebelum dimasukkan dalam APBN, katakanlah pada pertengahan 2015 sudah diumumkan melalui kegiatan itu. Walaupun belum ada proses tender, sudah jelas rencana programnya, sehingga ketika nanti masuk dalam APBN, dana sudah siap dan pelaku usaha siap untuk ikut tender.

Terkait pertumbuhan ekonomi, kita melihat trennya akan positif, walaupun saya berharap jangan terlalu tiba-tiba. Misalnya dari 5,3 persen naik ke 5,5 persen. Barangkali tidak akan sampai di atas enam persen, tapi kita lihat cukup kompetitif perekonomiannya.



**Candra Fajri Ananda**  
Dekan FEB Universitas  
Brawijaya

**J**ika dilihat pada level Asia, penurunan nilai mata uang kita beberapa waktu lalu sebenarnya masih relatif oke dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang memang harus diubah terkait dengan kebijakan ekonomi sepanjang 2015 adalah masalah *disbursement* anggaran. Dari sisi *government spending*, kita punya masalah.

Bagaimana dengan swasta? Kalau kita lihat pada kinerja investasi, terutama dari swasta, perkembangannya juga tidak istimewa, normal-normal saja karena masalah kurs tadi. Jadi kinerja ekonomi tidak *excellent* pada 2015, tapi kita cukup tahan melawan faktor-faktor eksternal. Dinamika ekonomi di daerah juga relatif oke, hanya beberapa provinsi yang mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun lalu.

Pada 2016, pengaruh kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menaikkan suku

bunga dan juga perlambatan perekonomian Tiongkok tidak akan terlalu memberikan gejolak seperti tahun ini. Yang harus dilakukan pemerintah menurut saya adalah transformasi ekonomi, terutama di sektor industri. Itu yang harus dijaga momentumnya.

Pada sektor industri, persoalan upah buruh yang menurut saya paling penting adalah kepastian jumlah yang disepakati. Yang kedua adalah masalah listrik, terutama di daerah-daerah luar Jawa. Jika tidak dibenahi, pertumbuhan industri akan tetap saja basisnya di Pulau Jawa lagi, sehingga ketimpangan kawasan barat dan timur akan makin lebar. Kalau mau jujur, *resources*-nya ada di sana (kawasan timur). Nah, langkah yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya membangun pelabuhan di daerah timur. Program tol laut juga bagus, tapi harus cepat direalisasikan.



**Suahasil Nazarra**  
Plt. Kepala Badan  
Kebijakan Fiskal

**P**emerintah berkomitmen mendorong supaya perekonomian bergerak, artinya melakukan upaya agar dunia usaha mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja. Selain kesempatan berusaha, mereka juga butuh kepercayaan diri. *Confident* ini yang menurut saya, kadang-kadang orang luar negeri justru melihat Indonesia jauh lebih meyakinkan dibandingkan yang dilihat oleh orang-orang di dalam negeri sendiri. Bagi dunia ekonomi internasional, pertumbuhan Indonesia sebesar 4,7 persen itu masih dianggap sebagai kesempatan besar.

Melalui beragam paket kebijakan, pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa kita punya perekonomian yang solid. Kita punya fundamental ekonomi yang sebenarnya cukup

untuk membangun *confident*. Arah dari kebijakan ekonomi kita juga sudah berbeda dengan katakanlah tiga hingga lima tahun yang lalu.

Kalau kita bisa mengalokasikan hingga 300 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur setiap tahun, maka kondisi infrastruktur lima tahun lagi akan berbeda. Dalam konteks itu, kita akan punya fundamental ekonomi yang jauh lebih kuat. Ketika pemerintah mengeluarkan paket kebijakan dan memberikan insentif bagi dunia usaha, pemerintah bermaksud mendorong perbaikan industri manufaktur. Jadi kepercayaan diri dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dibangun pemerintah sebenarnya masuk akal untuk kita punya sekarang.

Teks Dwinanda Ardhi



# INSENTIF PAJAK PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Tarif PPh Final Revaluasi Aktiva Tetap = ~~100%~~

Untuk permohonan penilaian kembali aktiva tetap  
yang diajukan pada:

20 Oktober 2015 s.d.  
31 Desember 2015

3%

1 Januari 2016 s.d.  
30 Juni 2016

4%

1 Juli 2016 s.d.  
31 Desember 2016

6%

Tarif

Dari selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali, di atas nilai sisa buku fiskal semula

Info lebih lanjut:



1500200 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak



Yang di miliki  
Wajib Pajak

**Seluruh**  
Aktiva Tetap



Yang dimiliki  
Wajib Pajak

**Sebagian**  
Aktiva Tetap

**Telah**  
melakukan  
penilaian Kembali Aktiva Tetap



**Belum**  
melakukan  
penilaian Kembali Aktiva Tetap

**Sapa yang dapat memanfaatkan?**

- WP Badan Dalam Negeri
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- WP Orang Pribadi yang melakukan pembukuan

**Aktiva apa saja yang bisa?**

Aktiva Tetap Berwujud, yang terletak di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak



**Telah melakukan**  
penilaian Kembali Aktiva Tetap

- Kelengkapan permohonan:
- SSP
  - Surat Permohonan Daftar aktiva tetap
  - Laporan penilaian aktiva tetap
  - Laporan Keuangan
  - Fotokopi Izin Usaha

**Belum melakukan**  
penilaian Kembali Aktiva Tetap

- Kelengkapan permohonan:
- SSP
  - Surat Permohonan
  - Peritaraan Nilai dan Daftar Aktiva Tetap yang akan direvaluasi

**Syarat Mengajukan**  
Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap



Syarat selengkapnya lihat:  
PMK No. 191/PMK.010/2015 dan PER-37/PJ/2015

# Menciptakan DAK yang Berdaya

Oleh: Joko Tri Haryanto\*

Banyak hal yang membedakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Orde Lama dan Reformasi. Jika sebelumnya otonomi daerah diletakkan di level provinsi, maka otonomi daerah di era Reformasi justru menitikberatkan penyerahan kewenangan di level kabupaten atau kota demi memperpendek rentang birokrasi. Di sisi lain, pelaksanaan desentralisasi fiskal juga dimaksudkan sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk menciptakan aspek kemandirian daerah, khususnya dalam memenuhi fungsi pemerintahan, pelayanan publik, sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh fungsi kewenangan kemudian diserahkan kepada daerah, kecuali enam kewenangan, yaitu di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta keagamaan.

Sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan kepada daerah tersebut, pemerintah juga wajib mengalihkan sumber-sumber pendanaan kepada daerah sesuai asas *money follows function*. Pengalihan sumber-sumber pendanaan diwujudkan dalam bentuk penyerahan basis pajak yang dapat dipungut di daerah, dengan tetap memperhatikan aspek legalitas hukum nasional. Sayangnya, heterogenitas daerah di Indonesia sangat beragam. Beberapa daerah memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa. Sementara itu, sejumlah daerah lainnya memiliki sumber pajak yang besar. Namun, ada juga daerah yang justru tidak memiliki kekayaan SDA dan sumber pajak yang memadai. Untuk mengurangi ketimpangan yang muncul, baik secara vertikal maupun horisontal, pemerintah kemudian memberikan bantuan kepada daerah

melalui mekanisme Transfer ke Daerah.

Mekanisme Transfer ke Daerah di dalam APBN dibagi menjadi Dana Perimbangan (Daper) dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (Otsus). Mekanisme Daper terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dan DAU diberikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* dan dapat digunakan secara mandiri oleh daerah tanpa ada aturan penggunaannya. Sementara itu, DAK bersifat spesifik dengan aturan yang tegas dalam mekanisme pemanfaatan di daerah. Secara filosofis, DAU dan DAK difungsikan sebagai alat pemerataan antardaerah (*horisontal imbalances*), sedangkan DBH digunakan sebagai pemerataan antara pusat dan daerah sekaligus sebagai koreksi atas eksploitasi SDA di era Orde Baru.

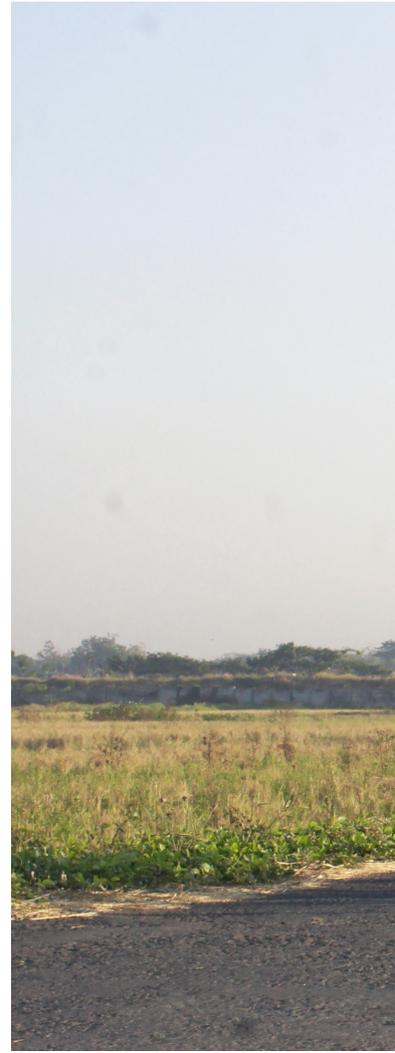
Sebagai sebuah mekanisme penyeimbang, besaran Transfer ke Daerah dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Berdasarkan data pemerintah, pada 2006 saja, alokasinya sudah mencapai Rp226,4 triliun atau 33,7 persen total Belanja Negara. Sementara itu, dalam APBN-P 2012, besaran Transfer ke Daerah mencapai Rp478,7 triliun atau 30,9 persen dari total Belanja Negara. Sejak APBN-P 2014, pemerintah kemudian menambahkan alokasi Dana Desa ke dalam mekanisme Transfer ke Daerah dengan perubahan nomenklatur menjadi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada 2016, hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam APBN menetapkan besaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp770,2 miliar.

## Reformasi 2016

Bersama dengan alokasi belanja subsidi, Transfer ke Daerah dikategorikan sebagai belanja yang bersifat mengikat dalam APBN.

Salah satu hal besar yang dilakukan adalah reformasi kebijakan Transfer ke Daerah pada 2016.

**Foto**  
dok. Biro KLI





Oleh karena itu, faktor ketepatan dan efektivitas menjadi isu utama yang dicermati seluruh pihak. Harapannya, mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini dapat menjadi *tools* yang mampu menciptakan *multiplier effect* pembangunan di daerah. Pemerintah betul-betul mencermati hal ini, khususnya di tahun 2016, yang menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam dokumen teknokratik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), RPJMN 2015-2019 memiliki tujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber

daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Salah satu hal besar yang dilakukan adalah reformasi kebijakan Transfer ke Daerah pada 2016. Dari sisi komposisi, jika sebelumnya mekanisme Transfer ke Daerah meliputi Daper, Dana Otsus, Dana Keistimewaan Yogyakarta, dan Dana Transfer Lainnya, skemanya diubah menjadi Daper, Dana Insentif Daerah, serta Dana Otonomi Khusus dan Kesitimewaan Yogyakarta. Di dalam komponen Daper sendiri, awalnya mencakup alokasi DBH, DAU, dan DAK. Pada 2016, komponen tersebut direformasi menjadi Dana Transfer Umum (*General Purpose Grant*) dan Dana Transfer Khusus (*Specific Purpose Grant*). Mekanisme DBH dan DAU tetap masuk dalam kategori Dana Transfer Umum,

sementara Dana Transfer Khusus dialokasikan untuk DAK Fisik dan Non-Fisik. DAK Fisik nantinya dialokasikan untuk DAK Reguler (sepuluh bidang), DAK Infrastruktur Publik dan DAK Afirmasi (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Sementara itu, DAK Non-Fisik dimanfaatkan untuk pembiayaan Batuan Operasional Sekolah (BOS), Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (Tamsil), Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Hal-hal inilah sekiranya yang menjadi bentuk reformasi kebijakan Transfer ke Daerah 2016.

Penulis sangat tertarik untuk menganalisis lebih mendalam terkait perubahan DAK. Dilihat dari nomenklatur, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan

Besaran alokasi DAK didasarkan pada data kebutuhan teknis dan usulan percepatan pembangunan infrastruktur dari daerah (proposal based), di luar yang didanai dari DAK reguler dan DAK Infrastruktur Publik serta belanja murni APBD, dan tidak ada kewajiban penyediaan Dana Pendamping.

kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Definisi daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis. Sementara definisi membantu adalah diberikan kepada daerah atau bidang yang menurut kebijakannya harus dibantu. Jadi, bukan menyediakan dana yang utama atau menggantikan yang sudah ada. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah adalah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Dasar hukum alokasi DAK adalah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan di bawahnya terdiri atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Rincian APBN. Adapun aturan teknisnya meliputi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) tentang

Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah.

Dalam reformasi dan penguatan kebijakan DAK 2016, utamanya ditujukan untuk mendukung implementasi Nawacita, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah, mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20 persen) dan kesehatan (lima persen) dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan

kebutuhan, mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (*proposal based*), memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar, dan pesisir/kepulauan, mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK, merealokasi dana transfer lainnya (BOS, TPG, TAMSIL, dan P2D2) ke dalam DAK Non Fisik dan menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Sebagai mekanisme yang membedakan, DAK Infrastruktur Publik Daerah besarnya Rp100 miliar per Kabupaten/Kota dengan penggunaan yang diarahkan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik di daerah yang belum didanai dari DAK Reguler. Adapun pilihan penggunaan untuk Bidang Infrastruktur Publik disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sebagai dasar alokasi, daerah juga wajib menyampaikan usulan kepada pemerintah. Besaran alokasi yang nantinya akan diberikan kepada daerah dilakukan dengan mempertimbangkan usulan percepatan pembangunan infrastruktur dari daerah (*proposal based*) dan di luar yang didanai dari DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan belanja murni APBD. DAK Infrastruktur Publik ini tidak mewajibkan penyediaan dana pendamping. Sampai dengan

maksimal lima persen dari alokasi DAK infrastruktur per daerah dapat digunakan untuk penunjang kegiatan fisik.

Hal yang sama diagendakan dalam alokasi DAK Afirmasi. Mekanisme DAK Afirmasi menggunakan pendekatan wilayah untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar, pesisir dan/atau kepulauan. Jumlah daerah yang masuk kategori perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar, pesisir dan/atau kepulauan akan dikoordinasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; dan Kementerian Dalam Negeri. DAK afirmasi nantinya diperuntukkan bagi Bidang Infrastruktur Dasar seperti Infrastruktur Transportasi (sub bidang jalan dan sub bidang transportasi perdesaan), Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum, dan Infrastruktur Irigasi. Seperti halnya DAK Infrastruktur Publik, sebagai dasar alokasi, daerah wajib menyampaikan usulan kepada pemerintah. Besaran alokasi DAK didasarkan pada data kebutuhan teknis dan usulan percepatan pembangunan infrastruktur dari daerah (*proposal based*), di luar yang didanai dari DAK reguler dan DAK Infrastruktur Publik serta belanja murni APBD, dan tidak ada kewajiban penyediaan Dana Pendamping.

Ketika seluruh modalitas pemerintah baik dari sisi kewenangan maupun pembiayaan sudah cukup memadai, tak salah jika semua pihak menuntut adanya peningkatan kinerja daerah melalui dukungan seluruh elemen yang terkait. Jika relasi hubungan tersebut dapat dimaksimalkan, pola desentralisasi fiskal di Indonesia akan menjadi *best practice* yang dirujuk oleh seluruh negara di dunia.

\*Peneliti di BKF, Kementerian Keuangan  
\*\*Pendapat pribadi tidak mencerminkan institusi



Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu  
Kementerian Keuangan

**Kini,**  
Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi  
**semakin  
mudah!**



[monev.anggaran.depkeu.go.id](http://monev.anggaran.depkeu.go.id)



Direktorat Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

# Menjadi Generasi Solusi Ala Sharlini

Sebagai Ketua Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Mata Garuda, Sharlini Eriza Putri memikul tanggung jawab yang besar. Sharlini dan rekan-rekannya di Mata Garuda harus dapat berkonsolidasi dengan alumni LPDP lainnya untuk memanfaatkan jejaring. Di sela-sela pekerjaannya mengelola start up di bidang pengelolaan energi, Sharlini juga mesti dapat memastikan seluruh target pencapaian organisasi yang sering disingkat MG itu bisa diraih.



**M**enurut perempuan kelahiran Jakarta, 29 September 1987 itu, lulusan LPDP ibarat tambang emas. Oleh karena itu, keberadaan MG penting agar para alumni dapat saling terkoneksi dan berkontribusi bersama untuk bangsa. Bagi Sharlini, belajar dengan beasiswa LPDP seperti impian yang menjadi kenyataan. Sejak kecil, dia sudah mempunyai target untuk masuk universitas top di luar negeri. “Belajar di luar negeri seperti sebuah implan yang ada di otak saya sejak kecil,” ujarnya. Sharlini bercerita bahwa bagi kedua orang tuanya, belajar hingga S2 adalah kewajiban anak-anak. Pendidikan setingkat S1 bermanfaat untuk membentuk kerangka berpikir logis, sedangkan program S2 berguna untuk membuka wawasan dan memperbesar jejaring.

Kehadiran beasiswa LPDP, menurut perempuan yang menekuni olahraga renang dan taekwondo itu, membuat Indonesia setara dengan negara-negara besar di Asia seperti Tiongkok dan

India. Beasiswa dari negara untuk kaum profesional muda dipandang sebagai investasi di bidang SDM. Sharlini sendiri berangkat ke Inggris pada tahun 2013 untuk melanjutkan pendidikan setingkat master di Imperial College London. Jurusan yang diambilnya adalah Sustainable Energy. Ini sejalan dengan latar belakang pendidikan yang dia tekuni sebelumnya di jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung.

Selama di Inggris, Sharlini banyak memperoleh pengetahuan dan wawasan soal pengelolaan energi di sana. “Saya belajar keterkaitan antara sisi engineering, policy, dan economics terkait energi terbarukan. Mulai dari nuklir, wind turbine, solar, biogas, dan lain-lain,” ujar anak pertama dari empat bersaudara itu. Yang unik, program studi yang dijalani Sharlini memberikan kesempatan untuk belajar, mulai dari kebijakan, hingga praktek tata cara jual beli dan pemasaran energi di Inggris dan negara-negara Eropa. Pemerintah Inggris dipandang lebih demokratis

dalam hal kebijakan di sektor energi. “Kalau di sini kan harga ditentukan oleh pemerintah. Sementara di Inggris, harganya ditentukan bukan hanya oleh pemerintah, melainkan juga mekanisme pasar,” katanya.

## Tesis perjuangan

Tantangan terberat belajar di luar negeri ditemui Sharlini saat mengerjakan tesis. Untuk menyelesaikan tugas akhir berjudul “Is Missing Strategic Planning the Root cause behind Lagging Low Carbon Technology Development in Indonesia?”, dia dibimbing oleh dua dosen sekaligus. Dosen pertama berasal dari Imperial College London dan pembimbing keduanya adalah pengajar di London School of Economics Science and Political Science. Sebagai mahasiswa dengan latar belakang pendidikan teknik, Sharlini dipaksa untuk melihat topik penelitiannya dari konteks politik dan hukum juga.

Meskipun penuh tantangan, banyak pelajaran didapatkan Sharlini



selama proses penyelesaian tesis. Dia jadi mendapatkan banyak pencerahan tentang kondisi pengelolaan energi di Indonesia. Studi yang ditempuhnya mengantarkan Sharlini menyelami kebijakan pengelolaan energi dari masa kemerdekaan hingga kini. Dari situ, dia melihat bahwa kaum muda tidak tepat jika hanya menyalahkan pengelolaan kebijakan. “Birokrasi memang masih menjadi tantangan, tetapi kebijakan dan insentif yang diberikan sebenarnya sudah banyak,” ujarnya.

Sharlini saat ini terjun langsung untuk membantu menghadapi tantangan pengelolaan energi dengan mendirikan start up. Fokus usahanya membantu perusahaan-perusahaan lokal menjual produk dengan harga yang kompetitif, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan multinasional. Caranya bagaimana? “Kami menganalisa proses dan utilitasnya dari awal serta mengidentifikasi rantai produksi yang kurang efisien,” ujar Sharlini. Dengan demikian, biaya produksi yang besar

karena proses yang kurang efisien dapat dikurangi.

#### Generasi solusi

Bagi Sharlini, mendirikan perusahaan adalah langkah nyata untuk menjadi generasi solusi. Persoalan energi yang masih banyak di dalam negeri salah satunya dapat diatasi jika generasi muda terjun langsung di dalamnya. “Kalau kita hanya menuntut saja kepada pemerintah, ‘Tolong dong dibangun PLTN di sini dan di sana,’ mereka pasti pusing lah,” kata Sharlini. Belum lagi jika berbicara tentang persoalan keterbatasan dana dan belum banyaknya investasi di bidang energi yang masuk. Ke depan, dia berharap makin banyak anak muda yang memiliki jiwa kewirausahaan dan bergerak di bidang energi.

Melalui MG, semangat menjadi generasi solusi itu juga ingin disebarkan Sharlini. Bersama teman-temannya yang terbagi dalam divisi inti Think Tank, Talent Hub and Strategic Partnership, dan Social Affairs, Sharlini telah membuat

rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Tahun 2015 diputuskan untuk membangun pondasi MG atau setting foundation. Yang dikerjakan pada tahap ini adalah pengesahan badan hukum yayasan, pembentukan sistem IT handal untuk pemetaan kompetensi dan permintaan, dan perumusan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan GCG (Good Corporate Governance).

Kurun waktu 2015-2019 disebut sebagai periode network enhancement. MG bertekad untuk mempererat jejaring dengan beberapa stakeholders seperti pemerintah pusat dan daerah, investor, dan inkubator. “Network ini bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi alumni untuk berkarya maksimal sesuai minat dan kompetensi,” ujar Sharlini.

Sementara pada jangka 2019-2025 atau disebut sebagai tahap bigger collaboration, jejaring MG diharapkan makin solid. Ketiga divisi inti juga ditargetkan siap berdiri sendiri di bawah payung MG. “Target pada tahap ini adalah Konsorsium Problem Solving, Annual Insight Think Tank sekelas CSIS (Centre for Strategic and International Studies), dan Hands On Transfer of Technology,” kata Sharlini. Pada 2025, MG akan menjalankan tahap empowering and making impact. Di tahap ini, MG diharapkan sudah menghasilkan berbagai kontribusi nyata seperti tersedianya 500 ilmuwan, 500 paten, 50 start up dengan 2000 lapangan kerja, 50 birokrat muda dengan 50 terobosan, dan 500 proyek di perbatasan.



gedung A.A. Maramis II Lt. 2  
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710  
Telp/Faks. (021) 3846474  
E-mail. lpdp@depkeu.go.id  
Twitter/Instagram. @LPDP\_RI  
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI  
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Teks Dwinanda Ardhi

# Mendefinisikan “Sukses” Pelaksanaan Proyek Pemerintah

Oleh Muhammad Fuad Anshari



**M**asih segar dalam ingatan kita ketika Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla mencanangkan akan menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia. Harapan masyarakat akan tumbuhnya perekonomian pun bangkit kembali di tengah perlambatan ekonomi dunia akhir-akhir ini. Lalu pernahkah terpikir dalam benak kita apakah pertumbuhan ekonomi akan serta merta meningkat dengan adanya proyek-proyek infrastruktur?

Dalam manajemen proyek, sebelum menentukan kriteria suksesnya suatu proyek, kita perlu mengerti definisi proyek tersebut. Harvard Business Review dan Project Management Institute setidaknya mendefinisikan proyek sebagai aktivitas yang bersifat sementara. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk tertentu dengan jangka waktu dan alokasi sumber daya yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa setiap proyek adalah unik. Dengan

begitu, ukuran sukses tidaknya suatu proyek berbeda-beda, tergantung tujuan proyek tersebut dan bagaimana cara mengeksekusinya. Selain itu, suatu proyek memiliki sifat sementara. Inilah yang membedakan proyek dengan kegiatan operasional rutin yang terus-menerus dilakukan. Ukuran sukses suatu proyek tergantung dari tiga hal dasar yaitu *scope*, *time*, dan *budget*.

*Scope* mengukur apakah proyek yang dilaksanakan dapat menghasilkan produk sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, juga mengukur apakah hasil penyelesaiannya dapat memuaskan pengguna. *Time* mengukur apakah proyek tersebut dapat menghasilkan produk tepat pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Sementara *budget*, mengukur apakah dana yang digunakan sudah sesuai dengan batasan anggaran yang ditentukan. Ketika ketiga pertanyaan ini sudah terpenuhi, maka proyek tersebut sudah bisa dikatakan sukses.

Kita ambil contoh proyek kereta api ringan

---

Jembatan Suramadu

---

**Foto**  
Kukuh Perdana

---

atau *Light Rapid Transit (LRT)*. Proyek ini dapat dibidang sukses ketika gerbong yang didatangkan beserta infrastruktur lainnya sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan serta berfungsi normal. Dengan begitu, kereta tersebut dapat menambah alternatif, kapasitas, dan meningkatkan daya angkut penumpang pengguna transportasi umum terutama saat *peak hours*. Kereta juga harus dapat digunakan oleh umum tepat pada waktunya. Biaya pembeliannya juga harus sesuai dengan batasan anggaran yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan yang terjadi jauh hari setelah selesainya proyek tersebut tidak menjadi ukuran sukses tidaknya proyek, melainkan menjadi ukuran baik tidaknya kegiatan operasional yang dilakukan. Misalnya saja perawatan rutin, penggantian *sparepart*, dan lain-lain.

Lalu apa saja faktor yang dapat mengakibatkan suatu proyek gagal? Pertama, sedikit atau tidak ada perencanaan. Kedua, kurangnya *leadership* dan komitmen dari pihak terkait. Ketiga, kurangnya pelatihan untuk teknologi baru. Keempat, tidak mengambil pelajaran pada proyek

terdahulu. Kelima, kurangnya pelatihan manajemen proyek, dan keenam, terlalu optimistik / tidak realistis.

Oleh karena setiap proyek memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kita tidak bisa mendefinisikan prioritas proyek secara umum. Mari kita ambil contoh sebelumnya yaitu proyek LRT Jakarta. Pertama, kita tentukan tujuan mana yang tidak bisa diubah/ terbatas (*constrained*). Proyek pemerintah biasanya paling banyak dibatasi hal keuangan (*budget*). Kemudian kita ketahui kebutuhan masyarakat akan moda transportasi umum alternatif semakin mendesak sehingga waktu penyelesaian pekerjaan harus bisa lebih cepat (*optimize*). Hal ini mengakibatkan mau tidak mau spesifikasi barang (*scope*) harus dikompromikan. Dengan menentukan prioritas, manajer proyek mampu menentukan sikapnya ketika mengelola suatu proyek.

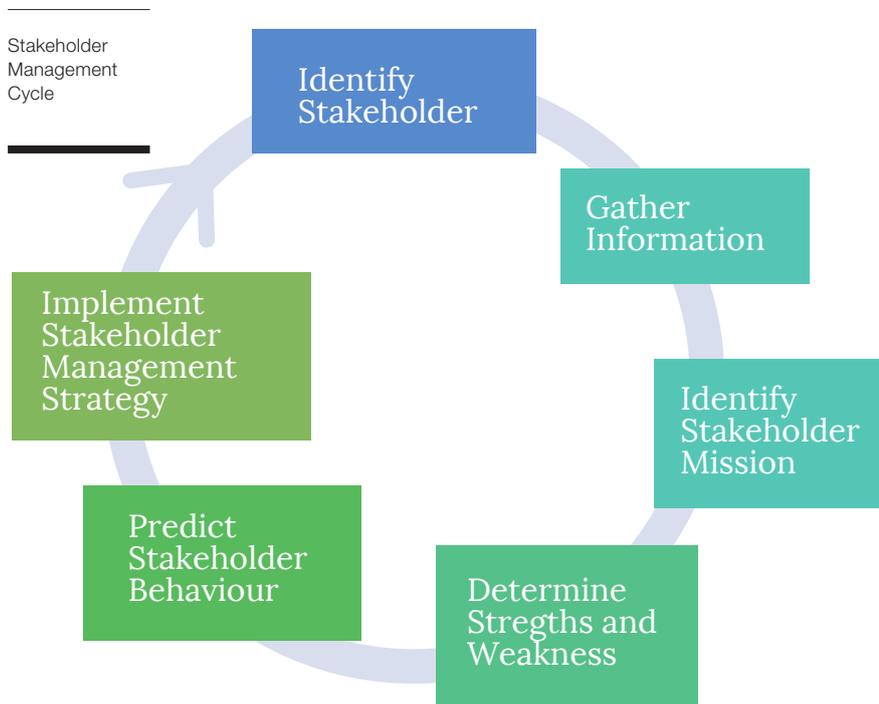
Masuknya *scope* dalam bagian kompromi bukan berarti kualitas barang diabaikan, Manajer harus bisa menyesuaikan spesifikasi barang dengan batasan-batasan yang ada seperti batasan maksimum anggaran yang digunakan. Selain itu, manajer proyek juga harus memilih vendor mana yang mampu menyelesaikan

pekerjaan dengan lebih cepat sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa yang ada. Menghasilkan produk yang sesuai harapan pengguna merupakan hal yang tidak mudah. Terlebih lagi, apabila dibatasi oleh anggaran dan dikejar waktu penyelesaian. Untuk itu, manajer bisa menggunakan *Stakeholder Management Cycle*.

Masih terkait kasus LRT tadi. Manajer proyek pertama-tama harus menentukan *stakeholder* mana saja yang terkait, seperti PT Kereta Api Indonesia, Jakarta MRT, dan masyarakat umum lainnya. Kemudian manajer dapat mengumpulkan informasi mengenai pihak terkait terutama visi dan misinya. Misalnya saja pentingnya keselamatan dan pelayanan, mengurangi macet, serta menyediakan jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya dan nyaman.

Dari sini manajer proyek meninjau pelaksanaan program-program yang telah ada dalam mencapai visi misi yang telah ditentukan. Dengan cara ini, kelemahan dan kekuatan dari program tersebut dapat lebih mudah ditemukan. Harapan masyarakat untuk perbaikan layanan yang telah diberikan juga dapat lebih cepat diidentifikasi. Belajar dari hal tersebut, manajer proyek kemudian menentukan strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan pembangunan LRT.

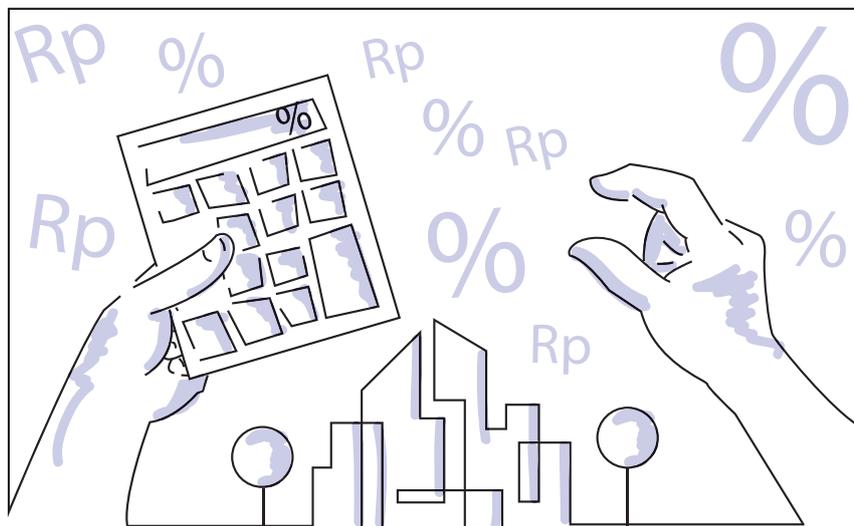
Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menyukseskan suatu proyek pemerintah, manajer akan lebih banyak menghadapi tantangan untuk memilih antara beberapa alternatif. Misalnya saja mengoptimisasi waktu atau spesifikasi produk yang akan dihasilkan dalam rangka memenuhi batasan-batasan anggaran dan peraturan yang berlaku. Selain itu, untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan pengguna, penting bagi manajer untuk mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik *stakeholder* terkait.



\*Pegawai Direktorat Jenderal  
Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko

# Manfaatkan Diskon PPh dalam Revaluasi Aset

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan 2016



**D**alam rangka menggairahkan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas ekonomi makro, Pemerintah mengulirkan sejumlah paket kebijakan agar dapat menjadi pengungkit roda perekonomian Indonesia yang sedang melambat. Dalam paket kebijakan V, Pemerintah memberikan kebijakan khusus bagi perusahaan yang melakukan penilaian ulang (revaluasi) aset berupa aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Kebijakan revaluasi aset merupakan stimulus dalam bentuk diskon Pajak Penghasilan (PPh) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta maupun perusahaan individu yang melakukan revaluasi aset. Penurunan tarif PPh tersebut tercantum

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan 2016. PMK yang berlaku efektif pada tanggal 20 Oktober 2015 ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008. Beberapa hal yang diatur kembali dalam PMK Nomor 191/PMK.010/2015 terkait tarif pajak, subjek pajak, dan objek pajak.

#### Perubahan tarif, subjek, dan objek pajak

Pada PMK Nomor 79/PMK.03/2008, tarif final PPh revaluasi aset lebih tinggi dan bersifat tetap yaitu sebesar 10 persen. Pemberlakuan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 memberikan tarif pajak yang lebih rendah dan

bersifat progresif berdasarkan waktu pengajuan revaluasi aset.

Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa apabila pengajuan proposal revaluasi aset dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, tarif PPh final revaluasi berkurang dari 10 menjadi 3 persen. Jika diajukan pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2016, tarifnya menjadi 4 persen, sedangkan jika diajukan pada 1 Juli hingga 31 Desember 2016, tarif yang berlaku 6 persen. Dengan kata lain, diskon tarif PPh mencapai 4 sampai 7 persen. Pengenaan tarif tersebut berdasarkan selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali, atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Dalam Pasal 2, Wajib Pajak (WP) yang berhak melakukan permohonan revaluasi aset meliputi wajib badan

dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap, dan WP orang pribadi yang melakukan pembukuan. Selain itu, termasuk juga WP yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, serta WP yang pada saat penetapan penilaian kembali masih berada dalam jangka waktu 5 tahun sejak dilakukannya penilaian kembali terakhir berdasarkan PMK Nomor 79/PMK.03/2008 (perusahaan baru boleh mengajukan revaluasi aset setelah 5 tahun melakukan penilaian aset).

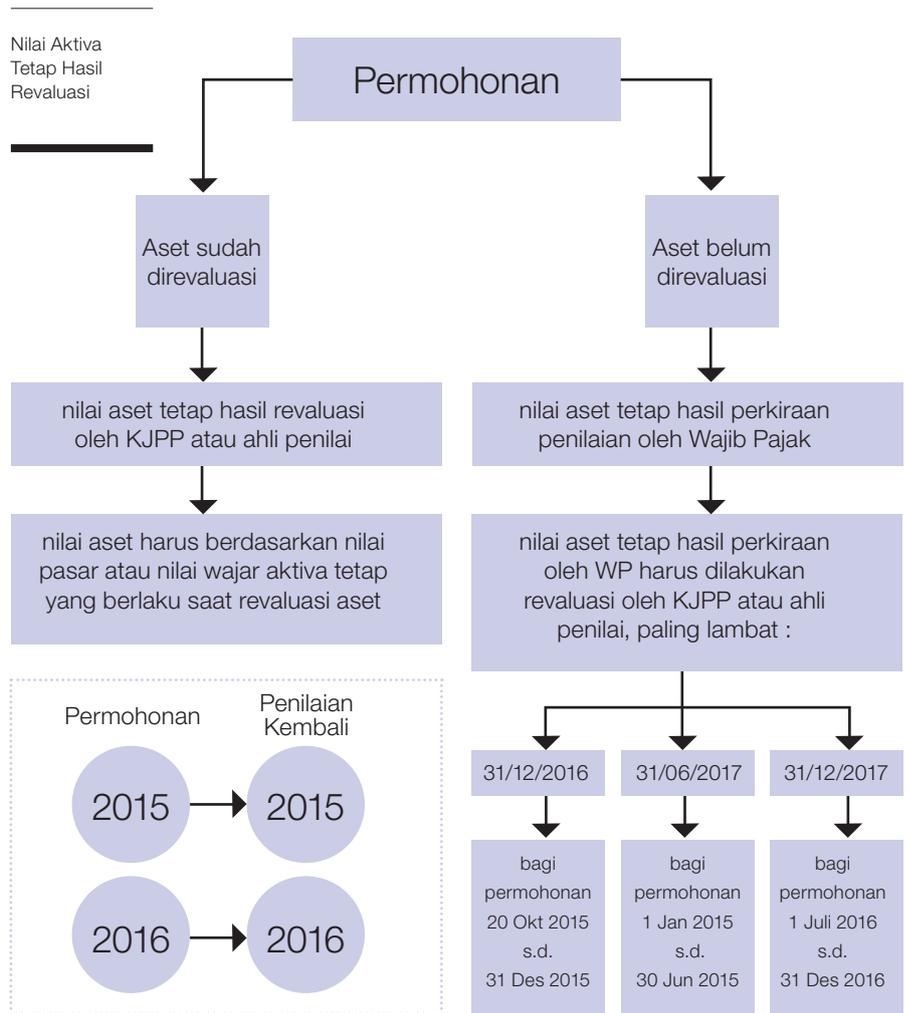
Perbedaan lain ialah menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, tidak termasuk dalam subjek pajak. Perubahan ketentuan objek pajak yaitu diperbolehkannya WP memilih untuk merevaluasi semua aset atau sebagian aset tetap.

Pasal 3 PMK menyebutkan aset yang dinilai kembali merupakan aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

### Penilaian Penilai Independen

Dalam pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa terhadap nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Apabila WP melakukan perkiraan penilaian kembali, penilaian kembali oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) harus dilakukan paling lambat:

- 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak 20 Oktober sampai dengan 31 Desember 2015;
- 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau
- 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.



Dalam menilai aktiva tetap, dasar penilaian KJPP berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap. Apabila nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh KJPP ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang bersangkutan.

### Penutup

Pemberlakuan PMK ini merupakan kesempatan emas bagi WP untuk mendapatkan insentif fiskal. Insentif berupa penurunan tarif PPh dan bersifat progresif, penambahan subjek pajak yang berhak melakukan revaluasi dan objek pajak yang bersifat opsional untuk seluruh maupun sebagian aktiva tetap, diharapkan bisa

menjadi angin segar bagi perusahaan. Selain insentif fiskal, keuntungan lain revaluasi aset ialah meningkatkan kapasitas dan performa finansial, serta mengikuti aturan internasional yang ditetapkan oleh *International Financial Reporting Standard (IFRS)* untuk menyajikan aktiva berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar. Bagi Pemerintah, kebijakan revaluasi aset dapat menambah pendapatan negara ditengah kemungkinan terjadinya *short fall* pajak. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan menyampaikan kebijakan revaluasi aktiva dapat menambah penerimaan negara sebesar Rp10 triliun.

Teks Budi Sulistyó

# Musik adalah Passion Saya

Maybe I just wanna fly. Wanna live I don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things they'll never see. You and I are gonna live forever. (Live Forever, OASIS)

**A**lunan lagu tersebut tak pernah gagal menyulutkan semangat Panji Pradana Putra di setiap kesempatan. Menghabiskan masa kecil di Bekasi, Panji sejak duduk di bangku sekolah sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia musik, khususnya gitar. Ia mengaku, perjalanan hidupnya banyak terinspirasi dari grup OASIS, sebuah grup *band* kenamaan asal Inggris. “Lagu *Live Forever* ini yang selalu menginspirasi saya. Kita tidak akan hidup selamanya, tapi berpikirlah kita akan hidup selamanya untuk berkarya,” tuturnya dengan semangat. “Musik adalah *passion* saya, tidak akan pernah redup,” katanya mantap.

Tidak hanya piawai memainkan gitar, pria berdarah Jawa dan Palembang ini juga hobi mendesain. “Saat (di bangku) sekolah saya suka menggambar. Bahkan sampai saat ini saya beberapa kali terlibat dalam urusan desain dan visualisasi,” jelasnya. Panji mengakui, sebenarnya

semasa Sekolah Menengah Atas ia ingin melanjutkan kuliah ke jurusan arsitektur. “Saya bercita-cita kuliah di jurusan arsitektur Universitas Indonesia atau Institut Teknologi Bandung,” katanya sembari tersenyum. Namun Tuhan berencana lain. Saat Panji gagal memasuki perguruan tinggi favorit tersebut, ia dihadapkan pada penerimaan mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Setelah memberanikan diri mendaftar, anak pertama dari tiga bersaudara ini dinyatakan lolos seleksi.

Mengeluti dunia akuntansi tak membuat Panji lepas dari hobi menggambar dan mendesain. Ia sering diberi kepercayaan untuk mendesain poster, spanduk, dan *name tag* untuk acara-acara kampus. Bagai gayung bersambut, saat pertama kali ditempatkan di Kementerian Keuangan, Panji diamanahkan untuk bekerja di unit yang menangani kehumasan Inspektorat Jenderal. Sekarang, peraih predikat Abang Bekasi dalam acara

pemilihan Abang Mpok Kabupaten Bekasi 2014 ini begitu menikmati pekerjaannya. Panji bersyukur bisa diberi kesempatan untuk menuangkan hobinya di majalah Auditoria Inspektorat Jenderal. Selain bisa gemar mendesain, diam-diam Panji mahir memotret dan menulis.

Panji meraih predikat Abang Bekasi dalam acara pemilihan Abang Mpok Kabupaten Bekasi 2014

Foto dok. pribadi



## Abang Bekasi 2014

Bukan pegawai biasa. Mungkin itu julukan tepat bagi peraih Juara I Lomba Fotografi ITJEN EXPO 2015 ini. Ihwal keikutsertaannya pada kompetisi pemilihan Abang Mpok Bekasi 2014 ini bisa dibilang cukup panjang. Setelah lulus dari STAN pada tahun 2013, Panji diharuskan menunggu selama beberapa bulan sebelum ada pengumuman penempatan di Kementerian Keuangan. Untuk mengisi kekosongan waktu tersebut, ia iseng-iseng mengikuti *casting* acara televisi. Setelah terpilih, Panji diberi kepercayaan untuk tampil sebagai figuran. Lama-kelamaan, ia dipercaya untuk mengisi beberapa *scene* adegan sinetron.

Banyak cerita suka dan duka saat Panji mengikuti berbagai *casting* tersebut. “Pernah waktu itu saya disuruh datang pagi, ternyata *shooting*-nya malam,” kenangnya. “Selain itu juga pernah ditipu manajemen (artis) yang menjanjikan akan memberi banyak peran,” tuturnya. Saat menikmati kesibukan di dunia entertainment itu, Panji mendengar informasi pemilihan Abang Mpok Kabupaten Bekasi 2014 melalui *twitter*.

Bisa jadi kelugasan Panji dalam bertutur kata dan rasa percaya dirinya yang tinggi memikat hati para juri. Ia pun lolos tahapan demi tahapan seleksi. Saat *grand final*, hanya tersisa 20 pasang finalis yang harus melalui proses karantina dan unjuk bakat. “Saat tahapan unjuk bakat, saya memilih bermain gitar, memainkan lagu Manuk Dadali diiringi dengan perkusi dari teman-teman SMA,” ujarnya. Akhir dari seluruh proses tersebut, Panji berhasil mengalahkan finalis lainnya dengan dinobatkan sebagai Abang Bekasi 2014 pada malam *grand final* tanggal 31 Agustus 2014 di Jababeka Convention Center.

Tak lama setelah menyandang gelar tersebut, Panji dipanggil untuk



mengikuti tes kemampuan dasar dalam rangka penempatan tugas di Kementerian Keuangan. Beruntung pria yang pernah menyabet juara I festival band di SMA 1 Tambun Selatan ini mampu mengharmonisasikan jadwal sebagai Abang Bekasi dan sebagai pegawai Inspektorat Jenderal. “Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi memahami tugas Abang Bekasi lebih bersifat seremonial. Komunitas Abang Mpok Bekasi juga beberapa kali mengadakan acara agar lebih dekat dengan masyarakat. Kita juga menjadi corong Pemda Bekasi, seperti menjadi humas. Sejauh ini tidak mengganggu jam kerja di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

### Mengagumi orang tua

Saat ini, Panji tengah menjadi wakil Kabupaten Bekasi dalam ajang Mojang Jajaka Jawa Barat 2015. “Saya mohon doa restu dan dukungan para pembaca Media Keuangan, bulan November ini saya akan maju mewakili Bekasi dalam Mojang Jajaka Jawa Barat 2015,” ujarnya sembari tersenyum. Saat ditanya apakah suatu saat akan lebih memilih dunia *entertainment* daripada kariernya sebagai pegawai negeri sipil, Panji mengakui saat ini ia menikmati pekerjaannya. “Apa yang pernah saya dapat di dunia *entertainment* ternyata

Foto  
dok. pribadi

bisa saya terapkan di kantor, seperti membuat video *company profile*, foto untuk majalah, dan sebagainya,” jelasnya.

Pria kelahiran 23 Februari 1992 ini diam-diam sangat mengagumi kedua orangtuanya. “Saya melihat etos kerja ibu yang tinggi. Ibu senang sekali masak, beliau menekuni bisnis katering rumahan dari bawah,” katanya. “Papa juga banyak membantu, meski beliau ada kesibukan lain sebagai karyawan swasta. Misalnya kalau ibu capek tidak bisa ke pasar pagi-pagi, ya papa yang pergi ke pasar sendiri,” jelasnya. Panji juga mengungkapkan mengenai sosok yang selama ini menginspirasi di lingkungan kantor. “Saya kagum dengan pribadi Pak Robert Gonijaya (Inspektur VII Inspektorat Jenderal). Beliau memperlakukan bawahan seperti teman. Saat *ngobrol* tidak terkesan *bossy*,” tutur Panji yang bercita-cita *traveling* ke Inggris, negeri asal band OASIS.

Teks Pradany Hayyu

# Berhenti Bertanya

**S**ejak kecil, Sophia banyak bertanya. Celotehan seolah tak henti mengalir dari bibir mungilnya. “Apa itu mimpi? Kenapa orang takut? Mengapa bintang berpijar?”

Ibunya kewalahan karena seringkali ia sendiripun tak tahu jawabnya. Kadang-kadang ia memintanya berhenti bertanya.

Seiring waktu, tiba saatnya ia bersekolah. Sophia pun mendapati bahwa bukan saja ibunya yang letih dengan pertanyaannya. Tapi juga guru dan teman-teman sebaya.

Rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk memahami membuatnya tak segan untuk mempertanyakan berbagai hal. “Dari mana datangnya bilangan itu? Kenapa simbol-simbol bisa menghasilkan angka yang beragam?”

“Hah? Begitu saja kamu nggak tahu? Kok bodoh banget sih?”, ujar teman sebangkunya sambil tertawa melecehkan. Ada rasa asing yang menjalar di dadanya. Air mata menyengat di sudut mata. Siap untuk tumpah bersama malu dan rendah diri. Membungkam pertanyaan akan dunia yang pernah dan akan singgah di benaknya.

Hari itu bagi Sophia, semua tanya sudah pergi. Untuk kemudian akan mati.

Pada suatu masa, kita adalah Sophia. Secara alami, kita lahir sebagai filsuf yang membawa cahaya bagi dunia. Kearifan murni yang anak sampaikan, punya potensi untuk menginspirasi atau dasar bagi peningkatan peradaban manusia. Namun orang dewasa seringkali melewatkannya. Bahkan turut andil mematikan kuncup ilmu itu sebelum ranum dan berkembang.

Di rumah, anak diminta untuk berhenti bertanya. Di sekolah, apresiasi diberikan karena menjawab, bukan karena mengajukan pertanyaan. Di lingkup sosial yang lebih luas, anak yang tenang dan tidak banyak protes diganjar label “pintar”.

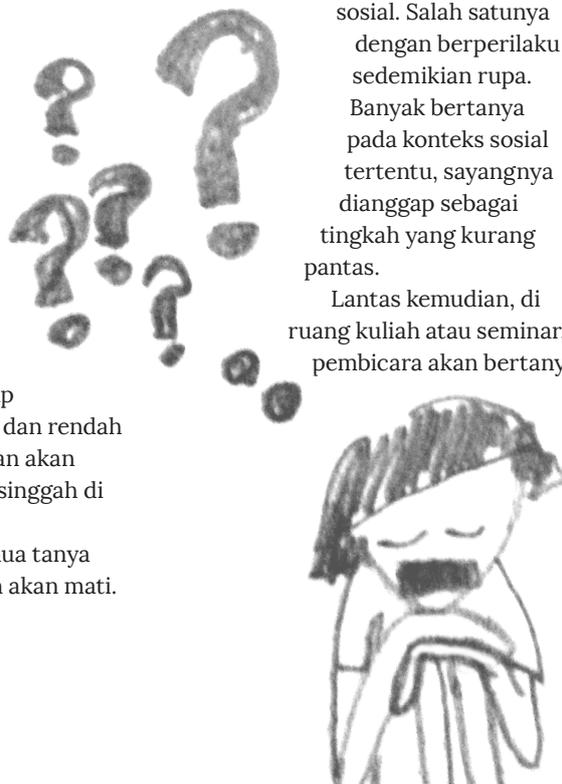
Memasuki usia dewasa, kita diberi tanggung jawab sosial. Salah satunya dengan berperilaku sedemikian rupa. Banyak bertanya pada konteks sosial tertentu, sayangnya dianggap sebagai tingkah yang kurang pantas.

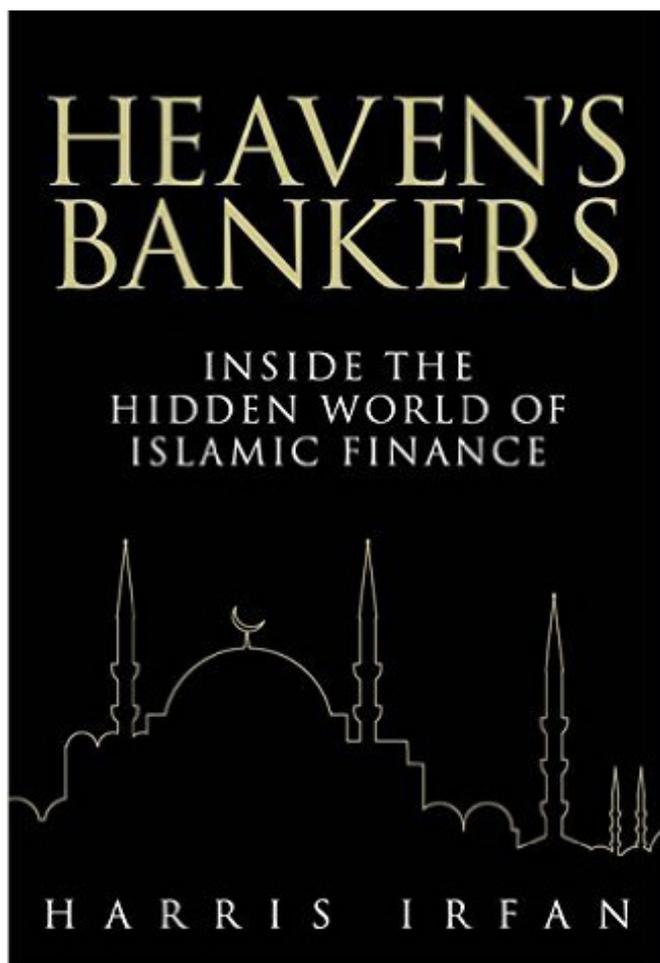
Lantas kemudian, di ruang kuliah atau seminar, pembicara akan bertanya

“Kenapa sedikit yang bertanya? Apakah sudah mengerti semua?” Pertanyaan yang kemudian dijawab dengan keheningan. Mungkin dipicu oleh rasa malu yang kita dan Sophia pernah rasakan. Seolah dengan bertanya kita salah atau terbelakang.

Padahal, rasa ingin tahu dan bertanya adalah tanda kompetensi komunikasi. Terutama pertanyaan yang menggugah daya analitis dan berpikir dalam kerangka sebab akibat seperti “Bagaimana jika..?” “Apa pendapatmu tentang..?” dan “Mengapa..?”

Tumbuh dan menjadi dewasa harusnya tidak perlu mematikan pijar rasa ingin tahu. Dengan berhenti bertanya kita akan melewatkan kesempatan emas. Tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan, pencerahan, kebijaksanaan. Tapi mungkin juga peluang yang mengubah hidup.





**Judul:** Heaven's Bankers, Inside the Hidden World of Islamic Finance  
**Penulis:** Harris Irfan  
**Penerbit:** The Overlook Press, NY  
**Halaman:** xx + 347 halaman.

<http://www.amazon.co.uk>

**K**euangan syariah tumbuh pesat. Praktik keuangan syariah telah menembus batas wilayah. Tidak hanya negara muslim, negara barat juga membuktikan keseriusan minat mereka. Semua itu diuraikan dengan sangat apik oleh Harris Irfan dalam bukunya *Heaven's Bankers*.

Lama berkarir di Deutsche Bank, Irfan banyak memaparkan seluk beluk praktik *investment bank*, jasa keuangan yang mereka lakukan, tidak terkecuali motif para pelaku dalam industri keuangan syariah. Irfan memberikan *insight* mengenai peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan industri ini. Misalnya, bagaimana Bank HSBC sebagai pionir memiliki mimpi mulia dalam pengembangan keuangan syariah.

Sebagai praktisi keuangan syariah, Irfan juga memberikan eksplorasi

yang cukup mendalam mengenai prinsip keuangan syariah serta sejarah perkembangannya. Diceritakan juga asal mula bank syariah yang diawali dari eksperimen Mit Ghamr di Mesir, lalu dilanjutkan di Pakistan oleh Muhammad Zia ul-Haq.

Buku ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tidak hanya mengenai prinsip keuangan syariah, namun juga praktik industri keuangan global. Dari pengalaman dan pengamatannya, Irfan mendorong pengembangan keuangan syariah untuk dapat menyentuh aspek dasar kehidupan. Aspek tersebut meliputi pemberdayaan masyarakat dan distribusi kekayaan yang merata. Itulah yang menjadi prinsip ekonomi Islam.

Buku ini layak dibaca siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai keuangan syariah dilihat dari sudut pandang Harris Irfan sebagai salah satu bankir ternama di dunia.

## 5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler

- 1 Mereka Bilang Saya Monyet Ayu Utami
- 2 Madakari Pura Hamukti Moksa Langit Kresna Hariadi
- 3 Ibu, dari mana aku Berasal? Lara Fridani
- 4 Duke Of Wyndham Yang Hilang Julia Quinn
- 5 Cerita Cinta Ibunda Ajeng Fitrianingtyas

## 5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 Desain Ikon dengan Photoshop dan Illustrator Mohammad Jeprie
- 2 Forensic Accounting and Fraud Examination Mary Jo Kranacher, Richard A. , Joseph T Wells
- 3 Advanced English Grammar for TOEFL Preparation Hotben D. Lingga
- 4 Blink: The Power of Thinking Without Thinking Martin Hewings
- 5 Basic English Practice Dian Nursalih Budi

## Versi Perpustakaan Kementerian Keuangan

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami:

Gedung Djuanda I Lantai 2  
 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1  
 Jakarta Pusat

 Perpustakaan Kemenkeu

 Perpustakaan Kementerian Keuangan

 @kemenkeuilb

[www.perpustakaan.kemenkeu.go.id](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id)

Pembaca akan dibawa menyelami wawasan ekonomi syariah dari perspektif global. Buku berbahasa Inggris tentu tidak 'seberat' yang dilihat. Uniknya, pembaca akan diajak memecahkan mitos-mitos keuangan syariah yang selama ini banyak muncul di tengah-tengah masyarakat.

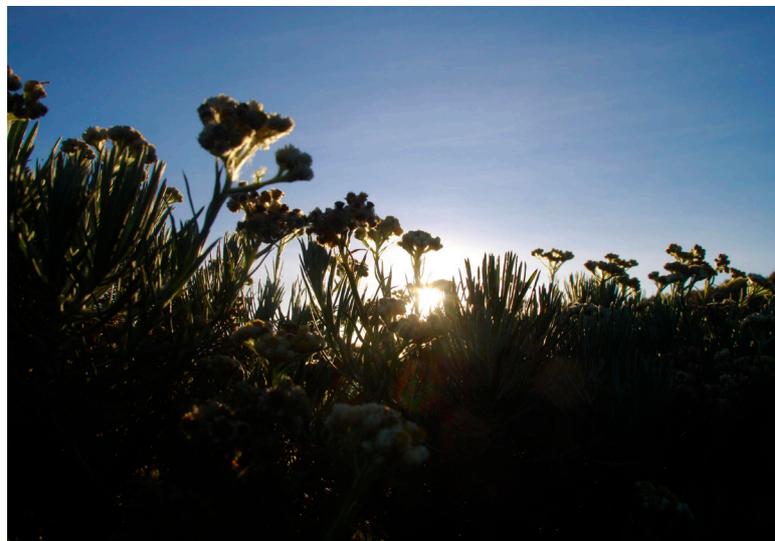
**Peresensi:** Dian Handayani



## Berburu Foto di Papandayan

Foto  
Adhi Kurniawan

Beberapa tahun ini, naik gunung semakin digemari banyak kalangan. Salah satu destinasi favorit para pendaki adalah Gunung Papandayan. Jalur pendakiannya juga tidak begitu berat membuat gunung yang terletak di Garut, Jawa Barat ini cocok dikunjungi bersama teman dan keluarga. Apalagi, akses menuju Papandayan sudah cukup baik, sekitar 6 jam berkendara dari Jakarta.



### Hutan Mati

Pada November 2002 silam, Papandayan mengalami erupsi. Letusan itu mengakibatkan sebagian gunung terbakar hingga menyisakan batang-batang pohon saja. Lokasi Hutan Mati sering digunakan untuk lokasi pemotretan. Permukaan tanahnya berwarna putih akibat campuran belerang. Dengan sisa pohon mati yang masih tegak, pengunjung seakan berada di dunia lain. Nuansa mistis nan misterius muncul di antara kayu yang menghitam.

### Pondok Saladah

Pondok Saladah adalah bumi perkemahan utama di Papandayan. Kawasan seluas hampir 8 hektar ini dikelilingi hutan yang menahan hembusan angin. Di tempat ini terdapat mata air dengan debit melimpah untuk

keperluan membersihkan diri. Namun, hindari penggunaan deterjen, sabun, shampo, atau pasta gigi agar aliran air tidak terkontaminasi bahan kimia. Tak perlu khawatir bila kurang membawa bekal. Banyak warga lokal yang berjualan makanan dengan cita rasa lezat dan harga bersahabat. Ketika cuaca cerah, lewat tengah malam pengunjung dapat mengamati rasi bintang yang bertebaran di langit.

### Padang Edelweis Tegal Alun

Tegal Alun di Papandayan merupakan hamparan luas padang edelweis. Rumpun-rumpun edelweis tumbuh rapat, membentuk komposisi menawan. Saat musim mekar, Tegal Alun didominasi warna putih dan kuning dari bunga edelweis. Pengunjung tidak diperbolehkan berkemah di sini. Selain

untuk menjaga kelestarian lokasi, hal ini juga demi keamanan pengunjung karena di sini masih banyak binatang liar berbahaya.

### Area Hoberhoet

Hoberhoet adalah bumi perkemahan yang terletak di lereng timur Papandayan. Pengunjung biasanya berkemah di sini untuk menunggu momen matahari terbit. Dari Hoberhoet, pengunjung dapat menikmati lanskap pegunungan yang membentang di Kabupaten Garut. Saat semburat fajar mulai merekah, segera pasang tripod dan siapkan kamera. Lalu, nikmati mentari yang mulai terbit berlahan sembari menyeruput kopi panas di depan tenda.

---

Teks Irma Kesuma Dewi

# Pendidikan itu Nomor Satu

Acha Sinaga tak melulu bicara soal akting di layar kaca. Finalis Miss Indonesia tahun 2009 lalu ini juga berani bicara mengenai pendidikan anak bangsa.

beralaskan *sleeping bag* dan hanya tidur di dalam sekolah karena tidak terdapatnya fasilitas penginapan di daerah.

“Dulu aku ikut gerakan terima kasih petani, cuma kelompok ini tidak bisa terus eksis karena agak susah, kita harus pergi menjangkau daerah-daerah yang banyak petani. Akhirnya (liat) di media sosial ada teman (ikut program) *teaching and travelling* ke banyak daerah dan kelihatannya seru. Ini namanya (komunitas) 1000 (seribu) guru,” ungkap artis yang baru saja merilis film ‘Get Up Stand Up’ di mall FX Jakarta, Rabu (11/11).

Ketika ditanya pengalaman tak terlupakan, lulusan London School ini mengaku saat selesai mengajar pernah diberikan sayuran dan kentang oleh salah seorang muridnya. “Ternyata itu hasil panen orang tuanya, sebagai ucapan terima kasih dari mereka. Terharu banget. Nilai materi tak seberapa tapi *it means a lot* buat kita,” katanya.

Terakhir, Acha berharap bagi anak bangsa yang masih memiliki kesempatan mengenyam pendidikan untuk terus mengejar cita-cita setinggi mungkin. Acha juga mengajarkan anak-anak sekolah dasar yang diajarnya untuk selalu bersyukur dan memanfaatkan waktu belajar sebaik mungkin.

Disisi lain, Acha juga berpesan bagi anak bangsa yang belum berkesempatan mendapat pendidikan yang memadai. “Seandainya belum memiliki kesempatan belajar di sekolah, (maka) tetap semangat belajar. Belajarlah sebanyak-banyaknya di lingkungan, di keluarga, lewat (media) buku, dan internet yang akan segera sampai di setiap kampung,” ujarnya.

**M**aria Dyer Achshahinta Sinaga atau yang lebih dikenal dengan nama Acha Sinaga ini mengaku bahwa pendidikan merupakan hal utama dalam hidupnya. “Aku *grew up* dari keluarga Batak yang memandang pendidikan itu penting, pendidikan itu nomor satu,” ucap Acha.

Dara kelahiran Medan, 30 Juni 1989 silam ini menaruh harapan besar pada sistem pendidikan di tanah air. Bintang FTV sekaligus bintang iklan ini menilai bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dijalankan pemerintah ini sudah baik. Meskipun demikian, menurutnya kenyataan dilapangan penyaluran dana BOS masih belum merata.

Untuk itulah, wanita yang sempat bercita-cita menjadi guru ini tergerak bergabung dalam komunitas 1000 guru, sebuah wadah yang turun langsung membantu pendidikan anak-anak pedalaman negeri. Tak jarang, gadis yang sudah dua kali terjun mengajar ini rela tidur

Foto dok. pribadi

Teks lin Kurniati

Jadilah  
**KONTRIBUTOR**  
Majalah Media Keuangan

Ketentuan  
selengkapnya  
dapat dilihat di:

<http://goo.gl/4mRysn>

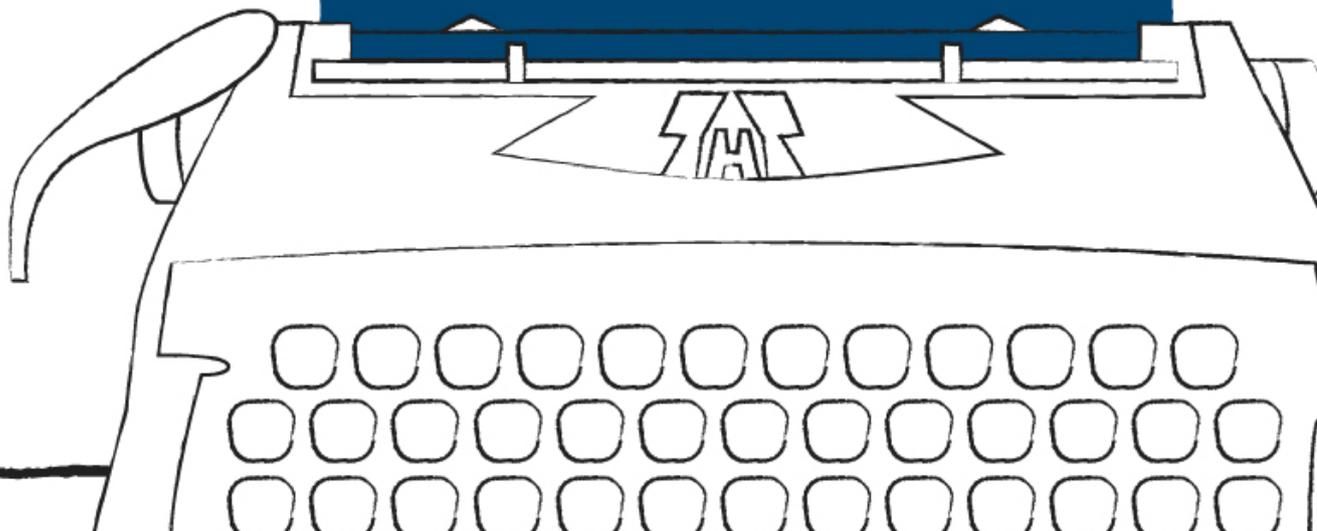
**MEDIAKEUANGAN**  
TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISCAL

**KETENTUAN PENULISAN:**

- Substansi tulisan tidak memiliki *tone* negatif dan memberikan dampak negatif bagi Kementerian Keuangan;
- Substansi tulisan tidak menyinggung SARA;
- Penulis memberikan kewenangan kepada Biro KLI untuk melakukan *editing* terhadap tulisannya sesuai dengan kaidah penulisan tanpa mengubah substansi;
- Tulisan menjadi sepenuhnya milik Biro KLI;
- Tulisan tersebut dikirim melalui email **mediakeuangan@kemenkeu.go.id**;
- Bagi pegawai yang tulisannya dimuat di majalah Media Keuangan akan mendapat insentif sesuai Standar Biaya Umum sebesar Rp100.000,00 (belum dipotong pajak) per halaman. Jumlah halaman yang dimaksud adalah halaman setelah di-*layout*.

**INFORMASI LEBIH LANJUT:**

**Redaksi Media Keuangan**  
Gedung Djuanda I Lantai 12  
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1  
Jakarta Pusat 10710  
T. 6330 (internal), 021 3849605 (eksternal)  
F. 021 3500847





KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Semangat  
untuk  
seluruh  
ibu..

